



**PENGARUH *SELF ASSESSMENT SYSTEM*,
SOSIALISASI PAJAK DAN SURAT TAGIHAN PAJAK
TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK PADA
KPP PRATAMA TEGAL**

SKRIPSI

Disusun sebagai salah satu syarat guna memperoleh derajat Strata Satu (S-1)
Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Pancasakti Tegal

Oleh :

MOH. CHAERRULLOH

NPM. 4315500088

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS PANCASAKTI TEGAL**

2019

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya Moh. Chaerrulloh, yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa Skripsi yang saya ajukan ini adalah hasil karya sendiri untuk mendapatkan gelar S1. Karya ini adalah milik saya, karena itu pertanggungjawabannya sepenuhnya berada pada saya.

Tegal, 19 Juli 2019

Yang Menyatakan



MOH. CHAERRULLOH
NPM. 4315500088

HALAMAN PERSETUJUAN

PENGARUH *SELF ASSESSMENT SYSTEM*, SOSIALISASI PAJAK DAN SURAT TAGIHAN PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK PADA KPP PRATAMA TEGAL

MOH. CHAERRULLOH

NPM. 4315500088

Disetujui Oleh :

Pembimbing I,



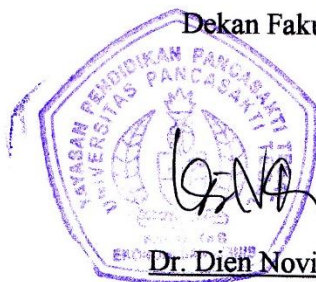
Sumarno, S.E., M.Si
NIPY. 8850811965

Pembimbing II,



Abdulloh Mubarak, S.E., M.M, Akt
NIPY. 15463171973

Mengetahui,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis



Dr. Dien Noviany R, S.E., M.M. Akt. CA.
NIPY. 136628111975

PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan proposal penelitian berjudul :

Pengaruh Pengaruh Self Assessment System Sosialisasi Pajak dan Surat Tagihan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kota Tegal

Yang diajukan oleh Moh. Chaerrulloh, NPM.4315500088 telah dipertahankan di depan Dewan Penguji pada tanggal 19 Juli 2019 dan dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima

Ketua Penguji



Dr. Dien Noviany R, S.E., M.M. Akt. CA.
NIPY. 136628111975

Penguji I



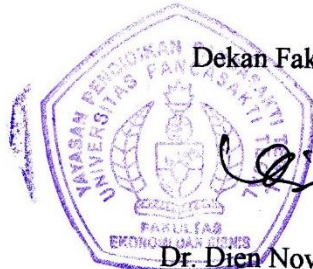
Abdulloh Mubarak, S.E., M.M. Akt
NIPY. 15463171973

Penguji II



Maulida Dwi Kartikasari, SE., M.Si
NIPY. 21662031989

Mengetahui,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis



Dr. Dien Noviany R, S.E., M.M. Akt. CA.
NIPY. 136628111975

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala rahmat dan karunianya, sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan skripsi berjudul : *“Pengaruh Self Assessment System Sosialisasi Pajak Dan Surat Tagihan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kota Tegal.”* Tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk memenuhi persyaratan guna memperoleh derajat Strata Satu (S-1) Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pancasakti (UPS) Tegal.

Dalam menyusun skripsi ini, peneliti menyadari bahwa skripsi ini belum sepenuhnya sempurna. Oleh karena itu, peneliti mengharapkan adanya kritik dan saran yang dapat membangun sehingga peneliti dapat melakukan perbaikan dan penyempurnaan. Peneliti berharap kiranya skripsi ini dapat bermanfaat bagi peneliti pada khususnya serta bagi setiap pembaca pada umumnya. Oleh karena itu pada kesempatan ini peneliti mengucapkan terima kasih kepada:

1. Dr. Dien Noviany R, S.E., M.M. Akt. CA., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pancasakti Tegal
2. Sumarno, S.E., M.Si., selaku pembimbing I yang telah memberikan pengarahan dan saran demi tersusunnya skripsi ini.
3. Abdullah Mubarak, S.E., M.M, Akt. selaku pembimbing II yang telah memberikan pengarahan dan saran demi tersusunnya skripsi ini.

Peneliti mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan segala bantuan dalam penyusunan skripsi ini. Peneliti berharap dengan adanya bantuan berbagai pihak tersebut, penyusunan skripsi ini dapat menjadi dasar yang kuat bagi perkembangan ilmu pengetahuan. Akhir kata peneliti ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya.

Tegal, 19 Juli 2019

MOH. CHAERRULLOH
NPM. 4315500088

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

- ❖ Simpan keluhan seperti engkau menyimpan aibmu. Jangan biarkan orang lain tahu bagaimana sebenarnya kau berjuang, sebab manusia menilai hanya sebatas luar. Kau kan disebut tukang mengeluh. Dekap susahmu luahkan dalam sujud pandangmu. Nanti akan ada saatnya kau tunjukan pada dunia bahwa kaupun pantas diberi tepuk tangan.

PERSEMBAHAN

- ❖ Sembah sujud serta syukur kepada Allah SWT. Yang telah memberikan kekuatan dengan kasih sayang-Mu telah membekaliku dengan ilmu atas karunia serta kemudahan yang Engkau berikan dan tidak lupa pula sholawat serta salam selalu terlimpahkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW.
- ❖ Ayah dan Ibu yang telah memberikan kasih sayang, segala dukungan yang tiada mungkin kubalas dengan selembar kertas yang bertuliskan kata cinta dan persembahan. Semoga ini awal untuk membuat Ibu dan Ayah bahagia karena kusadar selama ini belum bisa berbuat lebih. Terima Kasih Ibu.... Terima Kasih Ayah.... Untukmu, Ayah (DARJO) Ibu (SAUNAH).
- ❖ Untuk sahabatku “ Squad Anarxi” yang telah menemani saya dari masih kecil hingga sekarang sudah menjadi dewasa ini yang tidak bisa saya sebutkan satu per satu, dan teman-teman satu angkatan “Akuntansi 2015” khususnya untuk “*Squad Boejang E*” Adi, Alung, Dimas, Dul, Irvan, Juli, Satria terima kasih atas dukungan dan bantuannya.

ABSTRAK

Tujuan penelitian yaitu: 1) Mengetahui pengaruh *self assessment system* terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak KPP Pratama Tegal. 2) Mengetahui pengaruh sosialisasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak KPP Pratama Tegal. 3) Mengetahui pengaruh surat tagihan pajak terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak KPP Pratama Tegal.

Populasi Dalam penelitian ini yaitu sebanyak 204.950 wajib pajak yang terdaftar di KPP Pratama Tegal. Jumlah sampel yang diambil adalah sebanyak 100 orang. Teknik pengambilan sampel menggunakan metode *sampling purposive* yaitu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Dalam hal ini pertimbangan yang ditetapkan oleh peneliti adalah wajib pajak yang telah menjadi wajib pajak minimal setahun, komunikatif serta bersedia untuk dijadikan sampel.

Hasil penelitian adalah: 1) Adanya pengaruh yang positif dan signifikan *self assesment system* terhadap kepatuhan wajib pajak pada KPP Pratama Kota Tegal. Hal ini karena ditemukan nilai koefisien regresi *self assesment system* yaitu sebesar 0,179 nilai signifikansi yaitu sebesar $0,003 < 0,05$. 2) Tidak adanya pengaruh sosialisasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak pada KPP Pratama Kota Tegal. Hal ini karena ditemukan nilai koefisien regresi sosialisasi pajak sebesar $-0,078$ dan nilai signifikansi sebesar $0,290 > 0,05$. 3) Adanya pengaruh yang positif dan signifikan surat tagihan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak pada KPP Pratama Kota Tegal. Hal ini karena ditemukan nilai koefisien regresi surat tagihan pajak sebesar 0,633 dan nilai signifikansi pada variabel surat tagihan pajak yaitu sebesar $0,000 < 0,05$.

Kata Kunci : Kepatuhan Wajib Pajak; *Self Assessment System*; Sosialisasi Pajak dan Surat Tagihan Pajak

ABSTRACT

The research objectives are: 1) Knowing the effect of the self assessment system on the level of tax compliance in the Tegal Primary Tax Office. 2) Knowing the effect of tax socialization on Tegal Taxpayer's tax compliance. 3) Knowing the effect of tax bills on the level of tax compliance in the Tax Office of Tegal Pratama.

Population In this study, there were 204,950 taxpayers registered at the Tegal Primary Tax Office. The number of samples taken is 100 people. The sampling technique uses purposive sampling method, namely the technique of determining samples with certain considerations. In this case the consideration set by the researcher is a taxpayer who has become a taxpayer at least a year, communicative and willing to be sampled.

The results of the study are: 1) There is a positive and significant influence of the self assessment system on taxpayer compliance at KPP Pratama, Tegal City. This is because it is found the regression coefficient value of self-assessment system that is equal to 0.179 significance value that is equal to $0.003 < 0.05$. 2) There is no influence of tax socialization on taxpayer compliance at KPP Pratama, Tegal City. This is because it is found that the regression coefficient value of tax socialization is - 0.078 and a significance value of $0.290 > 0.05$. 3) There is a positive and significant effect of tax bills on taxpayer compliance at KPP Pratama, Tegal City. This is because it is found that the tax billing regression coefficient value is 0.633 and the significance value of the tax billing letter variable is equal to $0.000 < 0.05$.

Keywords : *Taxpayer Compliance; Self Assessment System; Tax Dissemination and Tax Bill*

DAFTAR ISI

	HALAMAN
HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI	iv
KATA PENGANTAR	v
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	vii
ABSTRAK	viii
<i>ABSTRACT</i>	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah	10
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	10
1. Tujuan Penelitian	10
2. Manfaat Penelitian	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	13
A. Landasan Teori	13
1. Teori Kepatuhan	13

2. Pajak	14
a. Pengertian Pajak	14
b. Fungsi Pajak	15
c. Tarif Pajak	16
d. Jenis Pajak	16
3. Kepatuhan Wajib Pajak	17
a. Pengertian Kepatuhan Wajib Pajak	17
b. Jenis Kepatuhan Wajib Pajak	18
c. Indikator Kepatuhan Wajib Pajak	19
4. <i>Self Assessment System</i>	20
a. Pengertian <i>Self Assessment System</i>	20
b. Manfaat <i>Self Assessment System</i>	21
c. Indikator <i>Self Assessment System</i>	23
5. Sosialisasi Pajak	24
a. Pengertian Sosialisasi Pajak	24
b. Manfaat Sosialisasi Pajak	25
c. Indikator Sosialisasi Pajak	25
6. Surat Tagihan Pajak	27
a. Pengertian Surat Tagihan Pajak	27
b. Fungsi Surat Tagihan Pajak	27
c. Indikator Surat Tagihan Pajak	27
B. Studi Penelitian Terdahulu	28
C. Kerangka Pemikiran	31

D. Hipotesis	34
BAB III METODE PENELITIAN	35
A. Jenis Penelitian	35
B. Subjek Penelitian	35
1. Populasi	35
2. Sampel	36
C. Definisi Konseptual dan Operasional Variabel	37
1. Definisi Konseptual Variabel	37
a. Kepatuhan Wajib Pajak	37
b. <i>Self Assessment System</i>	38
c. Sosialisasi Pajak	39
d. Surat Tagihan Pajak.....	39
2. Definisi Operasional Variabel	40
D. Teknik Pengumpulan Data	41
E. Uji Instrumen Penelitian.....	42
1. Uji Validitas.....	42
2. Uji Realiabilitas	42
F. Teknik Analisis Data dan Uji Hipotesis	43
1. Uji Asumsi Klasik	43
2. Analisis Regresi Linear Berganda	44
3. Uji Parsial (Uji t)	45
4. Koefisien Determinasi	45

BAB IV	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	47
A.	Sejarah KPP Pratama Tegal	47
B.	Data Identitas Responden	49
C.	Uji Instrumen Penelitian	51
1.	Uji Validitas	51
a.	Uji Validitas Kuesioner Kepatuhan Wajib Pajak	52
b.	Uji Validitas Kuesioner <i>Self Assessment System</i>	53
c.	Uji Validitas Kuesioner Sosialisasi Pajak	54
d.	Uji Validitas Kuesioner Surat Tagihan Pajak	55
2.	Uji Reliabilitas	56
D.	Teknik Analisis Data	57
1.	Uji Asumsi Klasik	57
a.	Uji Normalitas	57
b.	Uji Multikolinearitas	58
2.	Analisis Linear Berganda	59
3.	Uji Hipotesis (Uji t)	61
4.	Koefisien Determinasi	62
E.	Pembahasan	63
BAB V	KESIMPULAN DAN SARAN	66
A.	Kesimpulan	66
B.	Saran	67

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR TABEL

TABEL	HALAMAN
1.1 Data Kepatuhan Wajib Pajak dalam Pelaporan SPT	3
2.1 Penelitian Terdahulu	28
3.1 Definisi Operasional Variabel	40
4.1 Data Responden Menurut Umur	49
4.2 Data Responden Menurut Jenis Kelamin	50
4.3 Data Responden Menurut Pendidikan	51
4.4 Uji Validitas Kuesioner Kepatuhan Wajib Pajak	52
4.5 Uji Validitas Kuesioner <i>Self Assessment System</i>	53
4.6 Uji Validitas Kuesioner Sosialisasi Pajak	54
4.7 Uji Validitas Kuesioner Surat Tagihan Pajak	55
4.8 Uji Reliabilitas Kuesioner Penelitian	56
4.9 Uji Normalitas	57
4.10 Uji Multikolinearitas	58
4.11 Analisis Regresi Berganda	59
4.12 Uji Hipotesis (Uji t)	61
4.13 Koefisien Determinasi	62

DAFTAR GAMBAR

GAMBAR	HALAMAN
2.1 Kerangka Pemikiran	33

DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN	HALAMAN
1. Kuesioner Penelitian	72
2. Jawaban Uji Instrumen Kepatuhan Wajib Pajak	76
3. Jawaban Uji Instrumen <i>Self Assessment System</i>	77
4. Jawaban Uji Instrumen Sosialisasi Pajak	78
5. Jawaban Uji Instrumen Surat Tagihan Pajak	79
6. Jawaban Kuesioner Kepatuhan Wajib Pajak	80
7. Jawaban Kuesioner <i>Self Assessment System</i>	83
8. Jawaban Kuesioner Sosialisasi Pajak	86
9. Jawaban Kuesioner Surat Tagihan Pajak	89
10. Uji Validitas Kepatuhan Wajib Pajak	92
11. Uji Validitas <i>Self Assessment System</i>	93
12. Uji Validitas Sosialisasi Pajak	94
13. Uji Validitas Surat Tagihan Pajak	95
14. Uji Reliabilitas Kuesioner Penelitian	96

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pajak merupakan kontribusi wajib masyarakat kepada negara yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dan digunakan untuk keperluan negara sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat dan tidak mendapat imbalan secara langsung. Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar kepentingan dan pengeluaran umum (Mardiasmo, 2016: 3).

Pajak sebagaimana telah diketahui merupakan sektor pemasukan terbesar kas negara. Dalam struktur penerimaan Negara, penerimaan pajak merupakan komponen terbesar dan mempunyai peranan yang strategis. Serta sumber utama penerimaan dalam negeri untuk menopang pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan nasional. Oleh karena itu, pemerintah terus berusaha menaikkan target penerimaan pajak dari tahun ke tahun, agar program-program pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dapat ditingkatkan dalam mencapai kesejahteraan umum (Ananda dkk, 2015).

Mengingat pentingnya peran pajak terutama disaat perekonomian di Indonesia yang belum stabil dan tergolong masih lemah seperti saat ini. Keberlanjutan pembangunan nasional dan perekonomian negara terus meningkat karena adanya penerimaan negara. Usaha memaksimalkan penerimaan pajak tidak

dapat mengandalkan peran hanya dari Direktorat Jendral Pajak ataupun petugas pajak saja melainkan dibutuhkan juga peran aktif para wajib pajak. Semakin besar penerimaan negara, tentu semakin banyak fasilitas publik yang dapat disediakan pemerintah (Direktorat Jenderal Pajak:2012).

Dalam rangka memaksimalkan penerimaan pajak, maka masyarakat perlu mematuhi peraturan perpajakan yang diterapkan oleh pemerintah. Demi tercapainya penerimaan pajak, pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak melakukan inovasi terbaru untuk memberikan pelayanan sekaligus pengawasan dengan cara yang berbeda setiap tahun kepada wajib pajak, agar menghitung dengan benar dan melaporkan besarnya pajak yang harus dibayar melalui sarana atau formulir yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak (Ananda dkk, 2015).

Rendahnya kepatuhan dan minimnya kesadaran dari Wajib Pajak dikarenakan belum ditematkannya *Self Assesment System* sebagai pijakan (landasan filosofis) dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Dalam beberapa tahun terakhir sampai dengan 2016 penerimaan pajak tidak pernah tercapai. Bisa dilihat juga dari penerimaan pajak terakhir kali mencapai target adalah pada tahun 2008. Pencapaian target penerimaan pada tahun 2008 itupun sedikit dipengaruhi oleh kebijakan sunset policy yang diterapkan Direktur Jendral Pajak pada saat itu. Masalah ini mengundang berbagai macam pertanyaan apakah tidak tercapainya penerimaan pajak tersebut disebabkan oleh target pajak yang terlalu tinggi atau tingkat kepatuhan wajib pajak yang masih rendah (Nurlaela, 2018).

Tujuan kebijakan pemeriksaan yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak adalah untuk efektivitas pemeriksaan dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak serta meningkatkan penerimaan pajak. Untuk mencapai target penerimaan pajak yang salah satunya melalui kebijakan pemeriksaan. Banyak faktor yang menyebabkan rendahnya kepatuhan wajib pajak antara lain pembangunan infrastruktur yang tidak merata, korupsi, ketidakpuasan masyarakat terhadap pelayanan public, tingkat pengetahuan wajib pajak (Lasmaya dan Fitriani, 2017).

Untuk memberikan gambaran yang lebih deskriptif, maka dapat dilihat data tabel dibawah ini mengenai wajib pajak terdaftar dan wajib SPT, SPT Tahunan yang disampaikan serta kepatuhan pelaporan dalam surat pemberitahuan (SPT)

Tabel 1.1

Data Kepatuhan Wajib Pajak dalam Pelaporan SPT (dalam triliyun rupiah)

Tahun	Wajib Pajak Terdaftar	Wajib Pajak	SPT Tahunan Disampaikan	Kepatuhan Pelaporan SPT
2012	11.087.330		8.862.437	79,93%
2013	13.378.561		9.215.791	68,88%
2014	15.489.698		10.804.744	69,75%
2015	18.178.955		10.823.222	59,54%
2016	18.178.955		9.794.675	53,88%

Sumber : Data Dirjen Pajak Tahun 2016

Tabel diatas menunjukkan bahwa tingkat kepatuan wajib pajak yang masih rendah dan cenderung turun setiap tahunnya, itu berarti tingkat kesadaran wajib pajak juga masih kurang yang menyebabkan penerimaan pajak juga rendah (Direktorat Jenderal Pajak:2016).

Di dalam negeri rasio kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan pemenuhan kewajiban perpajakan dari tahun ke tahun masih menunjukkan persentase yang tidak mengalami peningkatan secara berarti. Hal ini didasarkan pada perbandingan jumlah wajib pajak yang memenuhi syarat patuh di Indonesia sedikit sekali jika dibandingkan dengan jumlah total wajib pajak terdaftar. Kepatuhan pajak merupakan persoalan yang sejak dulu ada di perpajakan.. Pemungutan kewajiban pajak memang bukan hal yang mudah tapi bukan hal yang sulit juga semua bisa dijalankan asal semua pihak berjalan lebih sesuai dengan tugasnya mulai dari petugas perpajakan, juga dituntut kemauan dari para wajib pajak itu sendiri bisa menyadari akan kewajiban pajaknya (Winerungan, 2013).

Kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pajak dapat dipengaruhi beberapa faktor yaitu. Faktor yang pertama yaitu sistem yang dijalankan oleh pemerintah salah satunya *self assessment system* yang akan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak karena wajib pajak mempunyai hak menghitung dan mealporkan sendiri kewajiban yang harus mereka bayar, serta faktor yang kedua yaitu *sosialisasi pajak* yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak karena masyarakat cenderung belum mengetahui pentingnya pajak bagi negara maka dengan diadakannya sosialisasi pajak maka wajib pajak akan sadar dan mengetahui perpajakan, serta faktor yang terakhir adalah *surat tagihan pajak* yang berfungsi sebagai menagih pajak terutang. Kepatuhan wajib pajak juga dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya sistem administrasi perpajakan suatu negara, pelayanan terhadap wajib pajak, penegakan hukum perpajakan, pemeriksaan pajak dan tarif pajak (Lasmaya dan Fitriani, 2017).

Tingkat penerimaan pajak yang rendah di Indonesia menjadi fenomena yang terus menerus terjadi, banyak masyarakat yang masih menilai pajak merupakan beban bagi mereka, kurangnya kesadaran mereka dalam memenuhi kewajiban pajak, padahal pajak sangat penting di Indonesia, Pemahaman wajib pajak sangat mempengaruhi wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. jika masyarakat tetap masih sulit memenuhi kewajiban pajak maka Surat Tagihan Pajak akan dikeluarkan untuk menagih pajak ataupun memberi sanksi. Kurangnya pemahaman dan pengetahuan wajib pajak terhadap ketentuan Peraturan-Peraturan Perundang-Undangan Perpajakan menyebabkan wajib pajak merasa tidak memiliki kewajiban untuk membayar pajak (Faizin dkk, 2016).

Rustiyahningsih, (2011) mendefinisikan masyarakat cenderung sulit untuk menjalankan sistem pajak yang sudah ada, hal ini yang menyebabkan target pajak yang tidak mencapai target. Target pajak yang tidak tercapai ini tercermin dari rendahnya penerimaan pajak yang diterima pemerintah. Kepatuhan perpajakan diartikan sebagai suatu keadaan yang mana wajib pajak patuh dan mempunyai kesadaran dalam memenuhi kewajiban perpajakan.

Direktorat Jendral Pajak membentuk unit kerja yang bertugas memberi wawasan agar kesadaran masyarakat terkait pentingnya membayar pajak. Kantor Pelayanan Pajak merupakan unit kerja dari Direktorat Jendral pajak yang melaksanakan pelayanan langsung kepada masyarakat, unit ini berkerja memberi segala macam informasi dan sosialisasi perpajakan kepada masyarakat, pengetahuan adalah hasil kerja fikir yang merubah tidak tahu menjadi tahu dan menghilangkan keraguan terhadap suatu perkara perpajakan (Faizin dkk, 2016).

Self assessment system yang telah menggantikan sistem perpajakan sebelumnya mengubah paradigma pajak selama ini sehingga pembayaran pajak tidak lagi dipandang sebagai beban melainkan tugas kenegaraan, masyarakat diberi kepercayaan dan tanggung jawab penuh untuk menghitung dan menentukan sendiri kewajiban pajaknya. Oleh karena itu wajib pajak dituntut kejujurannya dalam pelaksanaan *self assessment system* untuk lebih meningkatkan perpajakannya. Dalam pelaksanaan *self assessment system* menuntut kepatuhan dari wajib pajak, maka sistem ini akan menimbulkan peluang besar bagi wajib pajak untuk melakukan tindakan manipulasi perhitungan jumlah pajak yang seharusnya dan tindakan kecurangan lainnya (Lasmaya dan Fitriani, 2017).

Kemauan membayar merupakan dimana seseorang suka rela untuk membayar, mengorbankan atau menukarkan sesuatu untuk memperoleh barang atau jasa. Berdasarkan definisi sebelumnya, maka dapat dikembangkan suatu definisi untuk kemauan membayar pajak. Kemauan membayar pajak dapat diartikan suatu nilai yang rela dikorbankan oleh seseorang (yang ditetapkan dengan peraturan) yang digunakan untuk membiayai pengeluaran umum negara dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi) secara langsung karena ketika wajib pajak tidak patuh dan tidak melaksanakan kewajibannya maka harus siap menerima konsekuensinya (Sudaryati dan Hehanusa, 2015).

Meskipun saat ini pemerintah sudah melakukan beberapa terobosan baru agar wajib pajak dapat membayar kewajiban pajaknya salah satunya menerapkan sistem *self assessment* akan tetapi masyarakat masih saja ada yang belum mengetahuinya maka diperlukan *Sosialisasi Pajak* dimaksudkan untuk memberi

pengertian pentingnya membayar pajak dan diharapkan masyarakat dapat mengerti dan paham tentang manfaat membayar pajak serta sanksi jika tidak membayar pajak. Sehingga dengan demikian sosialisasi pajak ini dapat berpengaruh untuk menambah jumlah wajib pajak dan dapat menimbulkan kepatuhan wajib pajak, Wajib Pajak akan cenderung tidak menjadi patuh ketika tidak memahami peraturan perpajakan. Namun sayangnya banyak orang yang telah beranggapan bahwa sekarang ini banyak orang telah kehilangan moral pajaknya, sehingga kesadaran membayar pajak pun berkurang dan pada akhirnya tingkat kepatuhan menurun (Aritonang dan Susilawati, 2014).

Tingkat kepatuhan wajib pajak dengan sendirinya akan meningkat dan penerimaan pajak negara juga semakin meningkat. Akan tetapi jika sosialisasi yang kurang mungkin berdampak pada rendahnya pengetahuan masyarakat tentang pajak akan menyebabkan rendahnya kesadaran masyarakat untuk membayar dan melaporkan pajak juga akan berdampak pada penerimaan pajak. Kesadaran wajib pajak atas perpajakan sangat diperlukan guna meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Adanya sosialisasi perlu dilakukan untuk meningkatkan kepatuhan dan kesadaran para wajib pajak untuk patuh akan kewajibannya dalam membayar pajak (Faizin dkk, 2016).

Surat Tagihan Pajak (STP) yang tidak kalah pentingnya dengan sosialisasi pajak. Surat Tagihan Pajak adalah surat yang digunakan untuk melakukan tagihan pajak dan sanksi administrasi berupa bunga atau denda. Surat Tagihan pajak merupakan surat pertama yang dikeluarkan jika wajib pajak tidak atau kurang bayar pajak, harus membayar denda, belum menjadi pengusaha kena pajak tetapi

telah memungut pajak PPN, atau telah dikukuhkan, membayar dan melaporkan PPN tetapi tidak benar. Dilihat dari pengertian tersebut dapat diketahui bahwa Surat Tagihan Pajak tidak hanya digunakan untuk menagih pajak saja, tetapi untuk menagih sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda yang terkait dengan kewajiban perpajakan, dalam penagihannya dapat juga dilakukan dengan surat paksa (SP) (Vegirawati, 2011).

Surat Tagihan Pajak merupakan sarana bagi pihak otoritas untuk melakukan penagihan, seperti yang diatur dalam Pasal 18 UU KUP. Oleh karena itu Wajib Pajak wajib berperan aktif, akan tetapi kondisi tersebut ternyata tidak sepenuhnya berjalan baik masih banyak Wajib Pajak yang berusaha menghindari pajak (Rachmawati dkk, 2015). Surat tagihan dalam Dispenda ini memuat dua item yaitu pertama kop surat, yang berisi masa pajak, tahun pajak terutang, nomor seri surat tagihan, dan nomor surat yang dikeluarkan Dispenda. Kedua yaitu isi surat, berisi identitas wajib pajak (nama, alamat, NPWPD, dan tanggal jatuh tempo surat tagihan) serta berisi penjelasan tentang dasar hukum pengenaan denda dan jumlah yang terutang pajak. Akhir dari isi surat tagihan terdapat himbauan cara pembayaran dan jatuh tempo pembayaran.

Penelitian Lasmaya dan Fitriani, (2017) dalam “*Pengaruh Self Assessment System Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak*”. Self Assessment System menunjukkan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Sama halnya dengan penelitian Nurlela (2018) dalam “*Pengaruh Self Assessment System dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak*”. yang menunjukkan Self Assessment System berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Sedangkan pada penelitian Sudaryati dan Hehanusa (2015) dalam “*Pengaruh Penerapan Self Assessment System Dan Kemauan Membayar Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak*” mengungkapkan bahwa Self Assessment System menunjukkan tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Hasil penelitian oleh Ananda dkk, (2015) dan Faizin dkk, (2016) menunjukkan bahwa *Sosialisasi Perpajakan* berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan pada hasil penelitian oleh Winerungan (2013) dan Adiatma dkk, (2015) berbeda dan membuktikan bahwa *Sosialisasi Perpajakan* tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Pada Penelitian Prasetyo (2016) dan Vegirawati (2011) menunjukkan hasil bahwa Surat Tagihan Pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Sedangkan pada penelitian Rachmawati dkk, (2015) menunjukkan hasil yang berbeda yaitu Surat Tagihan Pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

Dari penelitian terdahulu yang dikemukakan diatas yang menunjukkan hasil yang berbeda-beda dan perlu dilakukan pengembangan lagi untuk mendapatkan bukti yang empiris. Penelitian ini terinspirasi dari penelitian-penelitian terdahulu serta karena banyaknya fenomenaWajib Pajak yang tidak patuh pada kewajiban perpajakannya. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu terdapat pada variabel, tahun dan juga lokasi yang digunakan.

Dari uraian diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai Pengaruh Self Assessment System, Sosialisasi Pajak Dan Surat Tagihan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak yang akan dituangkan dalam bentuk skripsi dengan judul : **“Pengaruh Self Assessment System, Sosialisasi Pajak Dan Surat Tagihan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada KPP Pratama Tegal.**

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi diatas maka permasalahan yang dapat dirumuskan yaitu :

1. Apakah terdapat pengaruh *self assessment system* terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak pada KPP Pratama Tegal ?
2. Apakah terdapat pengaruh sosialisasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak KPP Pratama Tegal ?
3. Apakah terdapat pengaruh surat tagihan pajak terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak KPP Pratama Tegal ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian
 - a. Mengetahui pengaruh *self assessment system* terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak KPP Pratama Tegal.
 - b. Mengetahui pengaruh sosialisasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak KPP Pratama Tegal.

- c. Mengetahui pengaruh surat tagihan pajak terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak KPP Pratama Tegal.

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai informasi bagi peneliti lain yang akan meneliti masalah yang sama atau yang berkaitan dengan masalah ini dan memberikan bukti pengaruh kemauan membayar pajak bagi wajib pajak.

b. Manfaat Praktis

1) Bagi Pemerintah :

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan evaluasi serta masukan mengenai tindakan yang dapat diambil guna mengetahui tentang *self assessment system*, sosialisasi pajak, surat tagihan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak yang terdaftar dalam memenuhi kewajiban pajaknya pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tegal.

2) Bagi Penulis :

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan penulis mengenai pengaruh *self assessment system*, sosialisasi pajak, surat tagihan pajak terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak.

3) Bagi Akademisi :

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi ilmiah dan tambahan literatur bagi penelitian selanjutnya terkait pengaruh *self assessment system*, sosialisasi pajak, surat tagihan pajak terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak.

BAB II

TINJAUAN TEORI

A. Landasan Teori

1. Teori Kepatuhan

Kepatuhan pajak merupakan kondisi terpenuhinya semua kewajiban perpajakan dan hak perpajakan. Wajib Pajak dikatakan patuh (*tax compliance*) apabila penghasilan yang dilaporkan sesuai dengan semestinya, Surat Pemberitahuan (SPT) dilaporkan dan besarnya pajak yang terutang dibayarkan tepat waktu. Secara konsep, kepatuhan diartikan dengan adanya usaha dalam mematuhi peraturan hukum oleh seseorang atau organisasi (Sudaryati dan Hehanusa, 2015).

Ada dua kepatuhan Wajib Pajak yaitu kepatuhan formal dan kepatuhan material. Kepatuhan formal adalah keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi kewajiban perpajakannya secara formal berdasarkan ketentuan dalam undang-undang. Misalnya ketentuan tentang batas waktu pelaporan. Jadi, yang dipenuhi oleh Wajib Pajak hanyalah memenuhi ketentuan penyampaian SPT sebelum batas waktu. Kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar pajak secara formal dilihat dari aspek kesadaran Wajib Pajak untuk mendaftarkan diri, ketepatan waktu dalam membayar pajak, ketepatan waktu dalam menyampaikan SPT, dan pelaporan Wajib Pajak melakukan pembayaran tepat waktu. Definisi Kepatuhan Material yaitu semua ketentuan material perpajakan dapat dipenuhi secara hakekat (*substantive*), artinya berlandaskan dengan undang-undang perpajakan (Ananda dkk, 2015).

Rustiyahningsih (2011) mengemukakan bahwa kepatuhan dan kesadaran dalam pemenuhan kewajiban perpajakan tercermin dalam situasi sebagai berikut:

- a. Wajib Pajak memahami Peraturan Perundang-Undangan Perpajakan.
- b. Mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas
- c. Menghitung jumlah pajak terhutang dengan benar
- d. Membayar pajak terhutang tepat pada

2. Pajak

- a. Pengertian Pajak

Menurut Soemitro, “Pajak adalah iuran kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dipaksakan) dengan tidak dapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditujukan, dan yang digunakan untuk membayar keperluan umum” (Mardiasmo, 2016: 4).

Yolina (2009:12) mendefinisikan pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pajak merupakan pungutan negara yang tidak memberikan balas jasa secara langsung, sifatnya mengikat dan dapat dipaksakan, yang digunakan untuk kemakmuran rakyat. pajak memiliki peranan yang sangat penting dalam perekonomian Indonesia karena pajak merupakan

sumber utama bagi Negara Indonesia untuk mendanai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) (Wardani dan Wati, 2018).

Berdasarkan definisi pajak menurut para ahli diatas maka dapat disimpulkan bahwa Pajak merupakan “kontribusi wajib warga negara untuk kepentingan dan keperluan bersama maupun untuk pengeluaran negara yang dibayarkan kepada kas negara berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung”.

b. Fungsi Pajak

Fungsi pajak (Rahayu, 2013:26) dalam bukunya yang berjudul “Perpajakan Indonesia-Konsep dan Aspek Formal” yaitu:

1) Fungsi *Budgetair*

Fungsi *Budgetair* merupakan fungsi utama pajak, atau fungsi fiskal (*fiscal function*).

2) Fungsi *Regulerend*

Fungsi *Regulerend* disebut juga fungsi mengatur, yaitu pajak merupakan alat kebijakan pemerintah untuk mencapai tujuan tertentu.

Pajak akan langsung masuk kepada kas negara (Anggaran). dari sektor Ekonomi memiliki manfaat dari Anggaran dalam APBN 2018 untuk sekror ekonomi adalah Rp355,5 triliun. Dana tersebut digunakan untuk Pembangunan jalur KA sepanjang 23 kilometer, Pembangunan irigasi sepanjang 947kilometer dan lainnya. Serta dari sektor Pendidikan untuk pembangunan dan rehabilitasi 30rb ruang kelas dan meningkatkan

akses layanan pendidikan dasar, dengan indikator banyaknya siswa pada jenjang pendidikan dasar dan menengah penerima bantuan Program Indonesia Pintar. Pajak sebagai pendapatan negara tersebut membuat Ditjen Pajak melaksanakan insentif perpajakan melalui ekstentifikasi dan intentifikasi potensi pajak (Prasetyo, 2016).

Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa pajak di Indonesia sangatlah penting bagi kehidupan rakyat dan pengeluaran-pengeluaran negara oleh sebab itu wajib pajak harus menyadari akan pentingnya membayar pajak pajak.

c. Tarif Pajak

Berdasarkan pola presentase pajak, tarif pajak dibagi menjadi 4 macam (Winerungan, 2013) antara lain yaitu :

- 1) Tarif Pajak Proporsional/Sebanding
- 2) Tarif Pajak Tetap
- 3) Tarif Pajak Degresif
- 4) Tarif Pajak Progresif
- 5) Tarif Pajak Progresif.

d. Jenis pajak

Resmi (2014:7) mengungkapkan terdapat berbagai jenis pajak yang dapat dikelompokkan menjadi tiga, yaitu :

- 1) Menurut Golongan diantaranya pajak Langsung dan pajak tidak langsung
- 2) Menurut Sifat yaitu pajak subjektif dan objektif

- 3) Menurut Lembaga Pemungutnya, yaitu pajak pusat (Negara) dan pajak daerah.

3. Kepatuhan Wajib Pajak

a. Pengertian Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan pajak sebagai suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya, maka konteks kepatuhan dalam penelitian ini mengandung arti bahwa Wajib Pajak berusaha untuk mematuhi peraturan hukum perpajakan yang berlaku, baik memenuhi kewajiban ataupun melaksanakan hak perpajakannya (Aritonang dan Susilawati, 2014).

Wajib pajak yang patuh adalah wajib pajak yang taat dan memenuhi serta melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (Rahayu, 2013:138).

Kepatuhan Wajib Pajak adalah tindakan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Nurmantu (2005:148) mendefinisikan kepatuhan pajak merupakan kondisi terpenuhinya semua kewajiban perpajakan dan hak perpajakan. Wajib Pajak dikatakan patuh (*tax compliance*) apabila penghasilan yang laporkan sesuai dengan semestinya, Surat Pemberitahuan (SPT) dilaporkan dan besarnya pajak yang terutang dibayarkan tepat waktu (Sudaryati dan Hehanusa, 2015).

Jadi kepatuhan wajib pajak dapat peneliti simpulkan yaitu suatu pemenuhan kewajiban perpajakan yang dilakukan oleh pembayar pajak dalam rangka memberikan kontribusi bagi pembangunan sekarang ini yang diharapkan didalam pemenuhannya diberikan secara sukarela, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kepatuhan wajib pajak menjadi aspek penting mengingat sistem perpajakan Indonesia menganut sistem *self assessment* dimana dalam prosesnya secara mutlak memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar dan melaporkan kewajibannya. Hal ini sejalan dengan penyelenggaraan sistem tersebut karena WP dituntun berperan aktif dalam perpajakannya (Prasetyo, 2016).

b. Jenis Kepatuhan Wajib Pajak

Nurmantu dalam (Ananda dkk, 2015) menjelaskan ada dua kepatuhan Wajib Pajak yaitu :

1) Kepatuhan Formal

Kepatuhan Formal adalah keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi kewajiban perpajakannya secara formal berdasarkan ketentuan dalam undang –undang. Misalnya ketentuan tentang batas waktu pelaporan. Jadi, yang dipenuhi oleh Wajib Pajak hanyalah memenuhi ketentuan penyampaian SPT sebelum batas waktu.

Kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar pajak secara formal dilihat dari aspek kesadaran Wajib Pajak untuk mendaftarkan diri, ketepatan waktu membayar pajak, ketepatan waktu dalam menyampaikan SPT, dan pelaporan Wajib Pajak melakukan pembayaran tepat waktu.

2) Kepatuhan Material

Definisi Kepatuhan Material yaitu semua ketentuan material perpajakan dapat dipenuhi secara hakekat (*substantive*), artinya berlandaskan dengan undang-undang perpajakan.

c. Indikator Kepatuhan Wajib Pajak

Muliari dan Setiawan (2011) dalam (Winerungan, 2013) menjelaskan bahwa kriteria wajib pajak patuh menurut Keputusan Menteri Keuangan No.544/KMK.04/2000 wajib pajak patuh adalah sebagai berikut :

- 1) Tepat waktu dalam menyampaikan SPT untuk semua jenis pajak dalam dua tahun terakhir.
- 2) Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali telah memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak.
- 3) Tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan dalam jangka waktu 10 tahun terakhir.

- 4) Dalam dua tahun terakhir menyelenggarakan pembukuan dan dalam hal terhadap wajib pajak pernah dilakukan pemeriksaan, koreksi pada pemeriksaan yang terakhir untuk tiap-tiap jenis pajak yang terutang paling banyak lima persen. SPPT yang diterima wajib pajak berisi nominal yang harus dibayarkan sesuai dengan SPOP yang telah dilaporkan. Wajib pajak yang telah menerima SPPT harus segera membayar kewajibannya selambat-lambatnya 6 bulan setelah SPPT diterima.

4. *Self Assessment system*

a. Pengertian *Self assessment system*

Rahayu (2013:101) *Self Assessment System* adalah suatu sistem perpajakan yang memberi kepercayaan kepada Wajib Pajak untuk memenuhi dan melaksanakan sendiri kewajiban dan hak perpajakannya. Dalam hal ini dikenal dengan :

- 1) Mendaftarkan diri di Kantor Pelayanan Pajak
- 2) Menghitung dan atau memperhitungkan sendiri jumlah pajak yang terutang
- 3) Menyetor pajak tersebut ke Bank persepsi/ kantor pos
- 4) Melaporkan penyeteroran tersebut kepada Direktur Jenderal Pajak
- 5) Menetapkan sendiri jumlah pajak yang terutang melalui pengisian SPT (Surat Pemberitahuan) dengan baik dan benar.

Dari pendapat para ahli diatas dapat peneliti simpulkan *self assessment system* merupakan suatu sistem pemungutan pajak yang diterapkan untuk memberi kesempatan wajib pajak untuk menentukan, menghitung, dan melaporkan sendiri pajaknya.

b. *Manfaat Self Assessment System*

Sistem *self assessment* ini yaitu wajib pajak dipercaya fiskus untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri pajak terutang, wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada wajib pajak, wajib pajak bersifat aktif, pemerintah dapat menghemat waktu, tenaga, dan biaya sehingga dapat dialihkan untuk aktivitas lainnya, dan wajib pajak akan terdorong untuk memahami dengan baik sistem perpajakan yang berlaku. Ketentuan pemungutan *self assessment system* berhasil dengan baik bila masyarakat mempunyai pengetahuan yang tinggi, moral pajak yang baik, disiplin pajak yang tinggi yang meliputi kepercayaan wajib pajak terhadap negara (Lasmaya dan Fitriani, 2017).

Menurut Nurmantu (2003) dalam Sudaryati dan Hehanusa, (2015). Sistem ini wajib pajak memiliki tanggung jawab atas pajak harus memahami tentang sistem perpajakan yang berlaku dan juga menghemat waktu dan pelaksanaannya. Dengan dituntutnya wajib pajak mengetahui sistem perpajakan yang berlaku maka wajib pajak harus mencari informasi tentang pajak, informasi ini bisa didapatkan dengan datang ke KPP/KP2KP terdekat dan menanyakannya pada petugas pajak. Sehingga

dalam pelaksanaan self assessment ini wajib pajak tidak melakukan kesalahan fatal. Dalam sistem *Self Assessment System*, administrasi perpajakan berperan aktif melaksanakan tugas-tugas pembinaan, pengawasan dan penerapan sanksi terhadap penundaan kewajiban perpajakan berdasarkan ketentuan yang digariskan dalam peraturan perpajakan. Fungsi pengawasan memegang peranan penting dalam sistem *self assessment system*, karena tanpa pengawasan dalam kondisi tingkat kepatuhan Wajib Pajak masih rendah, mengakibatkan sistem tersebut tidak akan berjalan dengan baik, sehingga Wajib Pajak pun akan melaksanakan kewajiban pajaknya dengan tidak baik dan pada akhirnya penerimaan dari sektor pajak tidak akan tercapai.

Diharapkan dengan diterapkannya sistem ini wajib pajak lebih merasa ikut berperan dalam hal perpajakan, dan juga wajib pajak agar lebih mentaati pajaknya serta wajib pajak tidak merasa terbebani masalah biaya dengan adanya sistem ini. Berlakunya sistem *self assessment system* di Indonesia menunjang besarnya peranan wajib pajak dalam menentukan besarnya penerimaan negara dari sektor pajak yang didukung oleh kepatuhan pajak (*tax compliance*). disamping dengan adanya sanksi-sanksi yang dikenakan apabila wajib pajak tidak memenuhi kewajiban perpajakannya (Sudaryati dan Hehanusa, 2015).

c. Indikator *Self Assessment System*

Sistem ini menyebabkan wajib pajak mendapat beban berat karena semua aktivitas pemenuhan kewajiban perpajakan dilakukan oleh wajib pajak sendiri. Kewajiban wajib pajak dalam Self Assessment System menurut Rahayu (2013:101) menjelaskan bahwa :

1) Mendaftarkan Diri ke Kantor Pelayanan Pajak

Wajib pajak mempunyai kewajiban untuk mendaftarkan diri ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) yang wilayahnya meliputi tempat tinggal atau kedudukan Wajib Pajak.

2) Menghitung Pajak oleh Wajib Pajak

Menghitung besarnya pajak terutang yang dilakukan dengan cara mengalihkan tarif pajak dengan pengenaan pajaknya. Sedangkan memperhitungkan adalah mengurangi pajak yang terutang tersebut dengan jumlah pajak yang dilunasi dalam tahun berjalan yang dikenal dengan kredit pajak (*prepayment*).

3) Membayar Pajak Dilakukan Sendiri oleh Wajib Pajak

Dengan diselenggarakannya *self assessment sistem* maka wajib pajak diwajibkan membayar pajak terutangnya sendiri kepada Kantor Pelayanan Pajak (KPP).

5. Sosialisasi Pajak

a. Pengertian Sosialisasi Pajak

Winerungan (2013) dalam (Wardani dan Wati, 2018). Berpendapat sosialisasi adalah program-program yang dilakukan oleh Direktorat Jendral Pajak untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan masyarakat. Kurangnya sosialisasi mungkin berdampak pada rendahnya pengetahuan masyarakat tentang pajak yang menyebabkan rendahnya kesadaran masyarakat untuk melaporkan dan membayar pajak yang dapat menyebabkan rendahnya tingkat kepatuhan Wajib Pajak

Sosialisasi merupakan suatu upaya yang dilakukan Dirjen Pajak melalui berbagai metode untuk memberikan informasi terkait segala peraturan dan kegiatan yang berhubungan dengan perpajakan agar dapat dilaksanakan oleh masyarakat pada umumnya khususnya wajib pajak, baik orang pribadi maupun badan usaha (Faizin dkk, 2016).

Sedangkan menurut Basalamah (2004) dalam (Adiatma dkk, 2015). Sosialisasi adalah suatu upaya untuk memberikan pengertian, informasi, dan pembinaan kepada masyarakat khususnya wajib pajak mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan perpajakan. Fiskus berupaya sosialisasi kepada masyarakat dengan beberapa kegiatan yang dilakukan diantaranya penyuluhan, penyelenggaraan suatu kegiatan, cara sosialisasi kepada masyarakat, dan media sosialisasi cetak maupun elektronik.

Jadi dapat disimpulkan sosialisasi pajak merupakan kegiatan dimana bertujuan untuk memberi pengetahuan, atau informasi kepada masyarakat tentang segala sesuatu yang berkaitan dengan perpajakan.

b. Manfaat Sosialisasi Pajak

Penelitian Jannah (2016:46) dalam (Wardani dan Wati, 2018) menemukan sosialisasi pajak yang intensif dapat meningkatkan pengetahuan calon wajib pajak mengenai semua hal yang berkaitan dengan perpajakan. Kegiatan sosialisasi pajak adalah upaya dari Direktorat Jendral Pajak khususnya KPP untuk memberikan pengertian, informasi, dan pembinaan kepada masyarakat pada umumnya dan Wajib Pajak pada khususnya mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan peraturan dan perundang-undangan perpajakan. Dan diharapkan masyarakat dapat mengetahui lebih tentang segala sesuatu yang berkenaan dengan perpajakan, agar masyarakat patuh terhadap peraturan perpajakan sehingga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam menyetorkan kewajiban pajaknya.

c. Indikator Sosialisasi Pajak

Ditjen Pajak memberikan beberapa *point* terkait indikator sosialisasi dimana kegiatan ini diharapkan dapat memberikan kesadaran dan rasa peduli terhadap pajak yang dimodifikasi dari pengembangan program dan pelayanan perpajakan (Winerungan, 2013 : 30).

1) Penyuluhan

Bentuk sosialisasi yang dilakukan oleh Ditjen Pajak melalui berbagai media, baik media elektronik maupun media lain bahkan terkadang mengadakan penyuluhan secara langsung ke tempat (daerah-daerah) tertentu yang dianggap potensial pajaknya tinggi dan membutuhkan informasi yang lengkap dan terjamin kebenarannya.

2) Diskusi dengan wajib pajak dan tokoh masyarakat

Salah satu bentuk sosialisasi yang dilakukan oleh Ditjen Pajak yang lebih menekankan pada komunikasi dua arah baik dari segi petugas pajak (fiskus) maupun masyarakat khususnya wajib pajak yang dianggap memiliki pengaruh atau dipandang oleh masyarakat sekitarnya sehingga diharapkan mampu memberi penjelasan yang lebih baik terhadap masyarakat sekitarnya.

3) Informasi langsung dari petugas ke wajib pajak

Bentuk penyampaian informasi yang diperoleh secara langsung oleh wajib pajak dari petugas yang bersangkutan (fiskus) mengenai perpajakan.

4) Pemasangan *billboard*

Pemasangan billboard dan atau spanduk di pinggir jalan atau di tempat-tempat lainnya yang strategis dan mudah dilihat oleh masyarakat. Berisi pesan singkat, bisa berupa pernyataan, kutipan perkataan maupun slogan yang mudah dimengerti dan menarik sehingga mampu menyampaikan tujuannya dengan baik.

6. Surat Tagihan Pajak (STP)

a. Pengertian Surat Tagihan Pajak (STP)

Surat Tagihan Pajak menurut Ilyas dan Burton (2008:47) dalam Vegirawati (2011) adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan atau sanksi administrasi berupa denda dan atau bunga.

b. Fungsi Surat Tagihan Pajak

- 1) Sebagai koreksi atas jumlah pajak yang terutang menurut SPT Wajib Pajak
- 2) Sarana untuk mengenakan sanksi berupa bunga dan atau denda
- 3) Sarana untuk menagih pajak

Surat Tagihan Pajak dapat digunakan sebagai menstimulus kemauan Wajib Pajak melunasi tunggakan pajaknya sebagai langkah yang efektif sehingga kesadaran dan kepatuhan masyarakat dapat terwujud (Prasetyo, 2016).

c. Indikator Penerbitan Surat Tagihan Pajak

Sebab diterbitkannya STP menurut Vegirawati (2011) :

- 1) Pajak dalam tahun berjalan tidak atau kurang bayar
- 2) Berdasarkan penelitian STP terdapat kekurangan pembayaran akibat salah tulis dan atau salah hitung
- 3) Wajib Pajak dikenakan sanksi pajak administrasi berupa denda dan atau bunga
- 4) Pengusaha yang dikenakan pajak tidak melapor untuk dilakukan sebagai PKP

- 5) Pengusaha tidak/bukan PKP membuat faktur pajak
- 6) PKP tidak membuat faktur pajak atau membuat faktur pajak tapi tidak mengisi faktur pajak tidak lengkap.

B. Studi Penelitian Terdahulu

Penelitian tentang *Kepatuhan Wajib Pajak* sudah banyak dilakukan oleh peneliti-peneliti terdahulu yang menunjukkan hasil yang berbeda-beda. Berikut ringkasan penelitian-penelitian terdahulu tentang *Kepatuhan Wajib Pajak* sebagai berikut :

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Metode	Hasil Penelitian
1	Lasmaya dan Fitriani (2017)	Pengaruh Self Assessment System Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	Variabel Dependen : Kepatuhan Wajib Pajak Variabel Independen: Self Assessment System	Analisis Regresi Linier Sederhana	Self Assessment System menunjukkan berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
2	Sudaryati dan Hehanusa (2015)	Pengaruh Penerapan Self Assessment System Dan Kemauan Membayar Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	Variabel Dependen : Kepatuhan Wajib Pajak Variabel Independen : Self Assessment System dan Kemauan Membayar Pajak	Metode Analisis Regresi Berganda	Self Assessment System dan Kemauan Membayar Pajak menunjukkan tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

3	Ananda, Pasca Rizki; Kumadji, Srikandi. dan Husaini, Achmad. (2015)	Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Tarif Pajak, Dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	Variabel dependen : Kepatuhan Wajib Pajak Variabel independen : Sosialisasi Perpajakan, Tarif Pajak, dan Pemahaman Perpajakan	Metode Analisis Regresi Berganda	Sosialisasi Perpajakan Tarif Pajak, dan Pemahaman Perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak
4	Winerungan (2013)	Sosialisasi Perpajakan, Pelayanan Fiskus dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan WPOP	Variabel Dependen : Kepatuhan WPOP Variabel Independen : Sosialisasi Perpajakan, Pelayanan Fiskus Dan Sanksi Perpajakan	Metode Analisis Regresi Berganda	Sosialisasi Perpajakan, Pelayanan Fiskus dan Sanksi Perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak

5	Prastyo (2016)	Penerbitan Surat Tagihan Pajak Dan Tindakan Penagihan Dengan Tingkat Pelunasan Kewajiban Perpajakan	Variabel Dependen : Penerbitan Surat Tagihan Pajak Dan Tindakan Penagihan Variabel Independen : Tingkat Pelunasan Kewajiban Perpajakan	Metode Analisis Regresi Berganda	Hasil analisis Penerbitan Surat Tagihan Pajak berpengaruh positif terhadap Tingkat Pelunasan Kewajiban Perpajakan Sedangkan Tindakan Penagihan tidak berpengaruh terhadap Tingkat Pelunasan Kewajiban Perpajakan.
6	Vegirawati, (2011)	Hubungan Antara Penerbitan Surat Tagihan Pajak Dengan Penerimaan dan Kepatuhan Perpajakan Pada KPP Pratama Ilir Timur Palembang	Variabel Dependen : Penerimaan dan Kepatuhan Perpajakan Variabel Independen : Penerbitan Surat Tagihan Pajak	Metode Penelitian data sekunder	Hasil penelitian yaitu Hubungan Antara Penerbitan Surat Tagihan Pajak Dengan Penerimaan dan Kepatuhan Perpajakan memiliki hubungan yang positif terhadap Penerimaan dan Kepatuhan Perpajakan
7.	Rachmawati, Rizka Laila; Saifi, Muhammad dan Mayowan, Yuniadi (2015)	Pengaruh Surat Tagihan Pajak Daerah Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Restoran	Variabel Dependen : Kepatuhan Wajib Pajak Variabel Independen : Surat Tagihan Pajak	Metode penelitian <i>explanatory research</i>	Hasil penelitian Pengaruh Surat Tagihan Pajak Daerah berpengaruh signifikan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Restoran

C. Kerangka Pemikiran

1. Pengaruh *Self Assessment System* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak :

Sistem *Self Assesment* merupakan sebuah sistem dimana Wajib Pajak Mencatat, Melaporkan dan Membayar pajaknya sendiri dengan begitu Wajib Pajak tidak merasa terbebani dengan jumlah pajaknya karena wajib pajak sudah menghitung sendiri hutang pajaknya sehingga biaya pajak bisa secara transparan diketahui wajib pajak sehingga tingkat kepatuhan akan naik. Namun dengan pemberlakuan *Self assessment system* menyebabkan sebagian Wajib Pajak merasa mendapatkan beban berat karena semua aktivitas pemenuhan kewajiban perpajakan dilakukan sendiri. Apabila Wajib Pajak mengerti dan paham baik dengan perpajakan, maka Wajib Pajak akan tergerak untuk memenuhi kewajiban pajaknya berdasarkan *Self Assessment System* dan akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak begitupun sebaliknya. (Mardiasmo, 2016: 64).

Hal tersebut sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Lasmaya dan Fitriani (2018) dan Nurlaela (2017) bahwa *Self Assessment System* berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, sehingga diharapkan upaya sukarela dan peran aktif dari Wajib Pajak dalam memenuhi hak dan kewajiban perpajakannya.

2. Pengaruh Sosialisasi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Sosialisasi Pajak merupakan kegiatan dimana bertujuan untuk memberikan informasi atau pengetahuan yang berkaitan dengan perpajakan kepada masyarakat. Dengan diadakannya Sosialisasi Pajak maka pengetahuan masyarakat tentang pajak akan meningkat dengan begitu masyarakat akan mengerti pentingnya membayar pajak dengan demikian Wajib Pajak yang patuh dengan sendirinya akan meningkat. melalui sosialisasi pajak yang intensif dapat meningkatkan pengetahuan calon wajib pajak mengenai semua hal yang berkaitan dengan perpajakan. Tanpa adanya sosialisasi yang efektif kepada wajib pajak maka wajib pajak akan mengalami kesulitan dalam memenuhi kewajiban perpajakannya (Wardani dan Wati, 2018).

Untuk dapat memenuhi kewajiban perpajakan, Wajib Pajak dituntut untuk mengerti atau paham terhadap pengetahuan perpajakan yang telah disosialisasikan yang diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak (Faizin dkk, 2016). Hasil Penelitian oleh Ananda dkk, (2015) dan Faizin dkk, (2016). Menunjukkan bahwa *Sosialisasi Perpajakan* berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

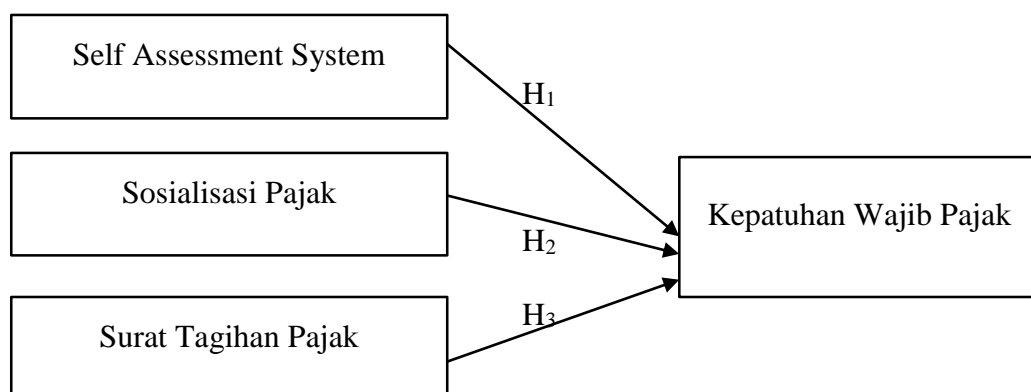
3. Pengaruh Surat Tagihan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Surat Tagihan Pajak merupakan surat yang berfungsi untuk menagih pajak dan sanksi pajak. Mardiasmo (2016:59) mendefinisikan sanksi perpajakan sebagai alat pencegah (preventif) agar wajib tidak melanggar norma perpajakan sehingga menjamin bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi.

Namun sistem perpajakan umumnya akan dianggap adil dan merata jika Wajib Pajak patuh untuk membayar pajak, Kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar hutang pajak merupakan posisi yang strategis untuk meningkatkan pendapatan negara. Pada Penelitian Prasetyo (2016) dan Vegirawati (2011) menunjukan hasil bahwa Surat Tagihan Pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

Kerangka pemikiran merupakan tabel diagram yang menjelaskan alur berjalannya sebuah penelitian. Berdasarkan penjelasan diatas maka diagram kerangka pemikiran penelitian ini adalah sebagai berikut :

Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran



D. Hipotesis

Perumusan hipotesis merupakan langkah ketiga dalam sebuah penelitian, setelah peneliti mengemukakan landasan teori dan kerangka pemikiran Menurut Sugiyono (2016: 96), Perumusan Hipotesis merupakan jawaban sementara dari permasalahan yang akan diteliti. Hipotesis disusun dan diuji untuk menunjukkan benar atau salah dengan cara terbebas dari nilai dan pendapat seorang peneliti. Adapun hipotesis yang dirumuskan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- H₁ = Terdapat pengaruh *Self Assessment System* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada KPP Pratama Kota Tegal
- H₂ = Terdapat pengaruh Sosialisasi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada KPP Pratama Kota Tegal
- H₃ = Terdapat pengaruh Surat Tagihan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada KPP Pratama Kota Tegal

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian berdasarkan jenis data yang digunakan, penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian kuantitatif yaitu data kualitatif berupa kuesioner yang akan dijabarkan dalam sebuah angka jawaban responden, sehingga data tersebut berubah menjadi data kuantitatif. Dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang sudah ditetapkan dan mengimplikasikan hasil analisis tersebut untuk dapat memperoleh kesimpulan. Berdasarkan tingkat eksplanasinya, jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian asosiatif (penelitian hubungan). Menurut Sugiyono (2016:13), penelitian asosiatif merupakan penelitian yang bertujuan untuk mengetahui hubungan antara dua variabel atau lebih.

B. Subjek Penelitian

1. Populasi

Menurut (Kuncoro, 2009: 118) dalam (Winerungan,2013). Populasi adalah kelompok elemen yang lengkap, yang biasanya berupa orang, objek, transaksi, atau kejadian dimana kita tertarik untuk mempelajarinya atau menjadi objek penelitian. Dalam penelitian ini populasinya adalah 204.950 Wajib Pajak yang terdaftar di KPP Pratama Tegal.

2. Sampel

Menurut Sugiyono (2016:91), sampel merupakan bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Jumlah sampel yang diambil adalah sebanyak 100 orang.

Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan metode *sampling purposive*. Menurut Sugiyono (2016:96) *sampling purposive* adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Dalam hal ini pertimbangan yang ditetapkan oleh peneliti adalah Wajib Pajak yang telah menjadi wajib pajak minimal setahun, komunikatif serta bersedia untuk dijadikan sampel.

Untuk menentukan ukuran sampel jika populasinya besar dan tidak dapat diketahui secara pasti maka digunakan sebuah rumus sebagai berikut :

$$n = \frac{Z^2}{4 (Moe)^2}$$

Dimana :

n = Ukuran Sampel

Z = Tingkat distribusi normal pada taraf signifikan 5% = 1,96

Moe = *Margin of Error*, yaitu pada tingkat kesalahan maksimal pengambilan sampel yang masih dapat ditoleransi.

Dengan menggunakan *Margin of Error* sebesar 10%, maka jumlah sampel minimal yang dapat diambil sebesar :

$$\begin{aligned} n &= 1,96^2 / 4 (0,1)^2 \\ &= 96,04 \text{ (dibulatkan menjadi 100)} \end{aligned}$$

Jadi ukuran sampel yang diambil adalah 100 wajib pajak

C. Definisi Konseptual dan Operasional Variabel

1. Definisi Konseptual Variabel

a. Kepatuhan Wajib Pajak

Dalam penelitian ini dari variabel Y tingkat Kepatuhan Wajib Pajak yaitu suatu pemenuhan kewajiban perpajakan yang dilakukan oleh pembayar pajak dalam rangka memberikan kontribusi bagi pembangunan sekarang ini yang diharapkan didalam pemenuhannya diberikan secara sukarela, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berlakunya sistem *self assessment system* di Indonesia menunjang besarnya peranan wajib pajak dalam menentukan besarnya penerimaan negara dari sektor pajak yang didukung oleh kepatuhan pajak (*tax compliance*). Dengan demikian dapat dikatakan bahwa kepatuhan wajib pajak merupakan pelaksanaan atas kewajiban untuk menyetor dan melaporkan pajak yang terutang sesuai dengan peraturan perpajakan. (Sudaryati dan Hehanusa, 2015).

Meliputi *Self Assessment System (X1)*, *Sosialisasi Pajak (X2)*, *Surat Tagihan Pajak (X3)* *self assessment system* diberlakukan untuk memberikan kepercayaan yang sebesar-besarnya bagi masyarakat guna meningkatkan kesadaran dan peran masyarakat dalam menyetorkan pajaknya *Sosialisasi Pajak* suatu proses dimana orang-orang mempelajari sistem nilai, norma dan pola perilaku yang diharapkan oleh kelompok sebagai bentuk transformasi dari orang tersebut sebagai orang luar

menjadi organisasi yang efektif. untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat sehingga mereka paham tentang perpajakan,

Surat Tagihan Pajak adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan atau sanksi administrasi berupa denda dan atau bunga.

b. *Self Assessment System*

Suatu sistem dimana mengharuskan wajib pajak untuk melakukan sendiri kewajibannya atas pajaknya. Kepercayaan diberikan oleh otoritas kekuasaan agar wajib pajak melaksanakan sendiri kewajibannya. Dalam hal ini dikenal dengan Menghitung pajak oleh wajib pajak, Membayar pajak dilakukan sendiri oleh wajib pajak, dan pelaporan dilakukan oleh wajib pajak. Sedangkan pejabat hanya membina dan mengawasi serta memastikan bahwa setiap wajib pajak telah melaksanakan sesuai dengan peraturan perundang - undangan (Mardiasmo 2005:7) dalam (Lasmaya dan Fitriani, 2017).

Kepatuhan yang diharapkan dengan sistem *self assessment system* adalah kepatuhan sukarela (*valuntary compliance*). Untuk meningkatkan kepatuhan sukarela dari Wajib Pajak, diperlukan keadilan dan keterbukaan dalam menerapkan peraturan perpajakan, kesederhanaan peraturan dan prosedur perpajakan serta pelayanan yang baik dan cepat dari Wajib Pajak (Sudaryati dan Hehanusa, 2015)

c. Sosialisasi Pajak

Menurut Sudrajat (2015:194) dalam Wardani dan Wati, (2018) sosialisasi perpajakan berarti suatu upaya yang dilakukan untuk memberikan informasi mengenai perpajakan yang bertujuan agar seseorang ataupun kelompok paham tentang perpajakan sehingga kepatuhan wajib pajak akan meningkat. Jika wajib pajak diberikan pemahaman yang baik dan benar melalui sosialisasi, maka wajib pajak akan memiliki pengetahuan tentang pentingnya membayar pajak, tanpa adanya sosialisasi yang efektif kepada wajib pajak, maka wajib pajak akan mengalami kesulitan dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Melalui sosialisasi pajak yang intensif dapat meningkatkan pengetahuan calon wajib pajak mengenai semua hal yang berkaitan dengan perpajakan. Tanpa adanya sosialisasi yang efektif kepada wajib pajak maka wajib pajak akan mengalami kesulitan dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Untuk dapat memenuhi kewajiban perpajakan, Wajib Pajak dituntut untuk mengerti atau paham terhadap pengetahuan perpajakan yang telah disosialisasikan yang diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak (Wardani dan Wati, 2018).

d. Surat Tagihan Pajak

Surat Tagihan Pajak (Resmi 2009:59) dalam (Vegirawati, 2011) adalah surat yang diterbitkan untuk melakukan tagihan pajak dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda. Surat tagihan pajak dikeluarkan apabila hasil analisis fiskus, wajib pajak tidak atau kurang

bayar, harus membayar denda, atau berkaitan dengan kewajiban sebagai PKP dalam hubungannya dengan pembayaran PPN. Surat tagihan pajak tidak akan diterbitkan oleh KPP apabila wajib pajak taat aturan pajak. Surat tagihan pajak dikeluarkan apabila jumlah pajak yang diterima oleh Negara lebih sedikit dari yang seharusnya. Penerbitan Surat tagihan pajak hanya akan dilakukan oleh KPP apabila wajib pajak tidak taat pajak.

Fungsi STP yaitu mengkoreksi jumlah pajak yang terutang menurut SPT WP, sarana mengenakan sanksi administrasi berupa bunga atau denda dan alat untuk menagih pajak. Lebih lanjut, berdasarkan fungsinya ini STP dikeluarkan apabila; PPH dalam tahun berjalan tidak atau kurang bayar, hasil penelitian SPT terdapat kekurangan pembayaran pajak sebagai akibat salah tulis atau salah hitung, dan WP dikenakan sanksi administrasi, penerbitan STP merupakan dasar tindakan penagihan, tindakan penagihan. (Prasetyo, 2016).

2. Definisi Operasional Variabel

Tabel 3.1

Definisi Operasional Variabel

Variabel	Dimensi	Indikator	Pertanyaan
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	Melaporkan	a. Melaporkan Pajak dengan benar	2
		b. Melaporkan tepat waktu	2
	Membayar	a. Membayar pajak terutang	2
		b. Membayar pajak tepat waktu	2
		c. Membayar pajak dengan sesuai	2
		d. Membayar pajak dikantor	2

Self Assessment System (X1)	Mendaftarkan	a. Mendaftarkan diri ke KPP Pratama	2
		b. Mendapatkan NPWP	2
	Menghitung	a. Menghitung pajak oleh wajib pajak	2
		b. Menghitung kredit pajak	2
	Membayar	a. Membayar pajak terutang	2
		b. Pelaksanaan pembayaran	2
Sosialisasi Pajak (X2)	Penyuluhan	a. Penyuluhan secara langsung	2
		b. Penyuluhan melalui media	2
	Komunikasi	a. Komunikasi dengan dengan petugas	2
		b. Komunikasi dengan wajib pajak	2
	Penyampaian Informasi	a. Dari perugas ke wajib pajak	2
	Pemasangan <i>billboard</i>	a. Pemasangan spanduk	2
Surat Tagihan Pajak (X3)	Kurang Bayar	a. Wajib pajak kurang bayar	2
		b. Wajib pajak salah hitung	2
	Tidak Melapor	a. Wajib pajak tidak melapor	2
		b. Wajib pajak tidak mengisi faktur	2
	Sanksi	a. Membayar denda	2
		b. Sarana Mengenakan sanksi dan bunga	2

D. Teknik Pengumpulan Data

Proses pengumpulan data terdapat dua jenis sumber data yaitu sumber primer dan sekunder. Dalam penelitian ini data yang digunakan yaitu jenis data primer, yang merupakan data yang diperoleh dari hasil *Account Representative* pada KPP Pratama Tegal. *Account Representative* adalah pegawai yang diangkat dan ditugaskan melakukan pengawasan dan penggalian potensi Wajib Pajak dan Pelayanan serta konsultasi Pajak.

Adapun dalam proses ini adalah data primer yang datanya diambil peneliti diperoleh langsung dan dikumpulkan langsung dari sumber asli tanpa perantara. Dalam penelitian ini peneliti melakukan penelitian lapangan dengan cara pengamatan langsung dan penyebaran kuesioner.

E. Uji Instrumen Penelitian

1. Uji Validitas

Pengujian validasi merupakan pengujian yang ditujukan untuk mengetahui suatu data yang dapat dipercaya kebenarannya sesuai dengan kenyataan. Menurut Sugiyono (2016:121) “Instrumen yang valid berarti alat ukur yang digunakan untuk memperoleh data itu valid. Valid berarti instrumen tersebut dapat digunakan dan dapat validasi isi dengan analisis item, dapat dilakukan dengan menghitung korelasi antara butir instrumen dengan skor total. Untuk dianggap memenuhi syarat adalah $r = 0,3$, jadi apabila korelasi anantara butir dengan skor total kurang dari 0,3 maka butir dalam instrumen tersebut dinyatakan tidak valid.

2. Uji Reliabilitas

Penguji reabilitas dalam penelitian ini menggunakan pengujian reliabilitas dengan *internal consistency*. Uji reliabilitas dilakukan untuk mengetahui seberapa jauh hasil pengukuran tetap konsisten apabila dilakukan pengukuran dua kali atau lebih terhadap gejala yang sama dengan alat pengukur yang sama.

Metode yang digunakan metode koefisien reliabilitas yang paling sering digunakan karena koefisien ini menggunakan variasi dari item item baik untuk format benar atau salah atau bukan, seperti format pada skala *likert*. Sehingga koefisien *alpha cronbach's* merupakan koefisien yang paling umum digunakan untuk mengevaluasi *internal consistency*.

Syarat minimum yang dianggap memenuhi syarat adalah apabila koefisien *alpha cronbach's* yang didapat 0,6. Jika koefisien yang didapat kurang dari 0,6 maka instrumen penelitian tersebut dinyatakan tidak reliabel. Apabila dalam uji coba instrumen ini sudah valid dan reliabel, maka dapat digunakan untuk pengukuran dalam rangka pengumpulan data

F. Teknik Analisis Data dan Uji Hipotesis

1. Uji Asumsi Klasik

a. Uji Normalitas

Uji normalitas yang dilakukan bertujuan untuk mengetahui apakah variabel dependen, independen atau keduanya berdistribusi normal, mendekati normal atau tidak. Model regresi yang baik hendaknya berdistribusi normal atau mendekati normal (Umar, 2015). Dalam model regresi linier, asumsi ini ditunjukkan oleh nilai error yang berdistribusi normal atau mendekati normal, sehingga layak dilakukan pengujian setara statistik. Pengujian normalitas data menggunakan Test Normality Kolmogorov-Smirnov dalam program SPSS.

b. Uji Multikolinearitas

Menurut Ghazali (2016:103) menyatakan uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Model yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel independen. Jika variabel tersebut saling berkorelasi, maka variabel-variabel ini tidak ortogonal. Variabel ortogonal adalah variabel independen yang nilai korelasi antar sesama variabel independen sama dengan nol.

Salah satu cara untuk dapat mendeteksi ada atau tidaknya multikolinearitas dalam model regresi adalah dapat dilihat dengan nilai *tolerance* dan nilai *inflation factor* (VIF). Nilai *cutoff* yang umum dipakai adalah nilai $Tolerance \leq 0,10$ atau sama dengan nilai $VIF \geq 10$.

2. Analisis Linier Berganda

Analisis regresi linier berganda adalah hubungan secara linear antara dua atau lebih variabel independen (X_1, X_2, \dots, X_n) dengan variabel dependen (Y). Analisis regresi linier berganda digunakan untuk merumuskan hubungan antara variabel dependen dan variabel independen, dengan jumlah variabel lebih dari satu (Yamin, 2011:29) dalam (Rachmawati, Dkk, 2015). Analisis ini untuk mengetahui arah hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen serta memprediksi nilai variabel dependen jika variabel independen naik atau turun. Adapun bentuk persamaannya adalah :

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + e$$

Keterangan:

Y = Kepatuhan Wajib Pajak	a = Konstanta
X ₁ = Self Assessment System	b ₁ ;b ₂ = Koefisien regresi
X ₂ = Sosialisasi Pajak	e = <i>error</i>
X ₃ = Surat Tagihan Pajak	

3. Uji Hipotesis (Uji t)

Uji ini digunakan untuk mengetahui apakah pengaruh masing-masing variabel bebas terhadap variabel terikat bermakna atau tidak pada model regresi. Menurut Sanusi (2012:126) dalam (Rachmawati, Dkk, 2015). uji hipotesis dengan menggunakan rumus t-test digunakan untuk menguji kekuatan hubungan antara X dengan Y. Dalam uji t tersebut mempunyai kriteria pengujian jika probabilitas nilai t atau signifikansi $< 0,05$ maka berarti hipotesis diterima atau terdapat pengaruh yang signifikan, sebaliknya jika nilai signifikansi $> 0,05$ maka hipotesis ditolak atau tidak terdapat pengaruh yang signifikan.

4. Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi (R^2) pada intinya untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah nol dan satu. Nilai R^2 berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua menjelaskan variasi variabel dependen.

Kelemahan mendasar penggunaan koefisien determinasi adalah bias terhadap jumlah variabel independen yang dimasukkan ke dalam model. Setiap tambahan satu variabel independen, maka R^2 pasti meningkat tidak peduli apakah variabel tersebut berpengaruh terhadap variabel independen. Oleh karena itu banyak peneliti menganjurkan untuk menggunakan nilai Adjusted R^2 pada saat mengevaluasi mana model regresi terbaik. Tidak seperti R^2 , nilai Adjusted R^2 dapat naik atau turun jika satu variabel independen ditambahkan ke dalam model (Ghozali, 2016:95).

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Sejarah KPP Pratama Tegal

Pada tahun 1964 tepatnya pada bulan Juni pemerintah mendirikan Kantor Inspeksi Keuangan Pekalongan yang diresmikan oleh DPJ Drs. Soejono Brotodihardjo. Dengan wilayah kerja dari Kantor Inspeksi Keuangan Pekalongan meliputi wilayah Karisidenan Pekalongan termasuk Kabupaten Tegal dan Brebes, sementara Kotamadya Tegal pada saat itu belum terbentuk.

Melalui Kantor Dinas Luar (KDL) Tingkat I Tegal, usaha untuk menggali potensi pajak terus digalakkan seiring dengan perkembangan perekonomian di kedua daerah tersebut Kabupaten Tegal baik pada saat itu hingga sekarang, ini tidak saja terkenal dengan produksi gula tebu, tetapi juga terkenal dengan daerah penghasil ikan. Selain itu di Tegal juga dikembangkan pertanian bawang putih yang berlokasi sekitar daerah Gunung Slamet, sedangkan untuk daerah Kabupaten Brebes yang memiliki areal bawang merah dan cabai merah yang luas mampu memproduksi kedua komoditi tersebut dalam jumlah besar. Bahkan produksi bawang merah dan cabai merah merupakan stok nasional untuk komoditi tersebut.

Karena adanya kondisi yang memungkinkan untuk berkembang, seiring dengan peningkatan potensi ekonomi masyarakat, maka Dirjen Pajak mempertimbangkan agar Kantor Dinas Luar (KDL) menjadi Kantor Inspeksi Tegal. Maka pada tahun 1970 Menteri Keuangan memberikan persetujuan untuk meningkatkan status sebagai Kantor Inspeksi Pajak Tegal dengan peresmiannya dilakukan oleh DJP Drs. Sutadi Sukarya.

Pimpinan kantor sementara pada waktu itu dijabat Bapak Soeryodiningrat merangkap sebagai Kepala Bagian Pajak Langsung. Selang beberapa bulan kemudian pimpinan yang baru dilantik oleh DJP Drs. Sukarya dan sebagai Kepala Kantor Inspeksi Pajak Tegal yang pertama adalah Drs. Setyarso.

Nama Kantor Inspeksi Pajak Tegal kemudian diubah menjadi Kantor Pelayanan Pajak (KPP) pada tahun 1989 sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan Dirjen Pajak, dalam Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 276/KMK/.01/1989 tanggal 25 Maret 1989 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dirjen Pajak, diatur tentang perubahan penanaman dari Kantor Inspeksi Pajak menjadi Kantor Pelayanan Pajak, dengan didasari bahwa dewasa ini tugas Dirjen Pajak tidak hanya melakukan inspeksi atau pemeriksaan semata tetapi juga mengutamakan pelayanan administrasi pajak kepada masyarakat luas terutama bagi Wajib pajak.

KPP Tegal sejak masih berstatus sebagai Kantor Dinas Luar Tingkat I dan Kantor Inspeksi Pajak Tegal telah mengalami perpindahan lokasi. Dimulai sejak masih menempati gedung milik Negara di Jalan Dr. Sutomo, hingga saat ini berlokasi di Jalan Kolonel Sugiono No. 5 Kotamadya Tegal. KPP Tegal termasuk dalam koordinasi Kantor Wilayah DJP Jawa Tengah I. Kantor KPP Tegal memiliki luas wilayah kerja sebanyak 458.339, terdiri atas tiga daerah antara lain Kodya Daerah Tingkat II Tegal, Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal dan Kabupaten Daerah tingkat II Brebes. Adapun batas wilayah Utara yaitu Laut Jawa sebagai batas Wilayah Utara, Kecamatan Bumiayu Brebes sebagai batas wilayah selatan, Kecamatan Warureja Tegal sebagai batas wilayah Timur serta Kecamatan Losari Brebes sebagai batas wilayah barat (Data sejarah KPP Pratama Tegal).

B. Data Identitas Responden

Kuesioner penelitian yang telah berhasil dalam uji instrumen yakni uji validitas dan uji reliabilitas, kini dapat diyakini akan menghasilkan data yang akurat dari responden wajib pajak. Langkah selanjutnya yaitu menyebar data kuesioner kepada 100 sampel responden. Data responden yang berhasil peneliti himpun sebanyak 100 sampel dapat diuraikan berdasarkan beberapa kriteria sebagai berikut :

1. Identitas Responden Menurut Umur

Dalam data kuesioner klasifikasi umur dijadikan identitas diri bagi para responden yang mengisi. Adapun data responden dengan klasifikasi umur menunjukkan keterangan jumlah sebagai berikut:

Tabel 4.1
Data Responden Menurut Umur

No	Keterangan Umur	Data Responden	
		Jumlah	Prosentase
1	25 - 34 Tahun	21	21%
2	35 - 44 Tahun	36	36%
3	> 45 Tahun	43	43%
Jumlah		100	100%

Sumber : Data Kuesioner Yang Diolah 2019

Menurut tabel tersebut diatas tertera data responden dengan kriteria umur 25 – 34 tahun yaitu sebanyak 21 orang atau 21%. Responden dengan umur 35 – 44 tahun yaitu sebanyak 36 orang atau 36%. Responden dengan umur > 45 tahun yaitu sebanyak 45 orang atau 45%. Dengan demikian data terbanyak adalah responden dengan usia > 45 tahun.

2. Identitas Responden Menurut Jenis Kelamin

Profil data responden yang berhasil dikumpulkan oleh peneliti dengan klasifikasi jenis kelamin tertera pada tabel dibawah ini. Klasifikasi tersebut memuat keterangan jumlah data sebagai berikut :

Tabel 4.2
Data Responden Menurut Jenis Kelamin

No	Keterangan Jenis Kelamin	Data Responden	
		Jumlah	Prosentase
1	Laki-Laki	53	53%
2	Perempuan	47	47%
Jumlah		100	100%

Sumber : Data Kuesioner Yang Diolah 2019

Data responden menurut jenis kelamin seperti tertera pada tabel diatas menerangkan jumlah kelamin laki-laki sebanyak 53 orang atau 53%. Adapun jumlah responden jenis kelamin perempuan sebanyak 47 orang atau 47%. Dengan demikian maka jumlah data responden jenis kelamin laki-laki adalah jumlah yang paling banyak.

3. Identitas Responden Menurut Pendidikan

Tingkat pendidikan merupakan faktor penting bagi seseorang sebagai identitas dirinya. Melalui pendidikan yang tinggi maka diharapkan seorang responden menjadi lebih akurat dalam penyampaian informasi data penelitian. Adapun jumlah responden dengan klasifikasi menurut tingkat pendidikan tertera sebagai berikut:

Tabel 4.3
Data Responden Menurut Pendidikan

No	Keterangan Pendidikan	Data Responden	
		Jumlah	Prosentase
1	SD	10	10%
2	SMP	17	17%
3	SMU	13	13%
4	Diploma	32	32%
5	Sarjana	28	28%
Jumlah		100	100%

Sumber : Data Kuesioner Yang Diolah 2019

Tabel ini menerangkan responden yang berpendidikan SD berjumlah 10 orang atau 10%; tingkat pendidikan SMP sebanyak 17 orang atau 17%; tingkat pendidikan SMU sebanyak 13 orang atau 13%; tingkat pendidikan Diploma sebanyak 32 orang atau 32% serta responden tingkat pendidikan Sarjana sebanyak 28 orang atau 28%. Dengan demikian data responden untuk tingkat pendidikan Diploma adalah data responden terbanyak.

C. Uji Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian memegang peran penting dalam penelitian kuantitatif karena kualitas data yang digunakan dalam banyak hal ditentukan oleh kualitas instrument yang dipergunakan. Instrumen tersebut haruslah memiliki kualifikasi tertentu yang memenuhi persyaratan ilmiah. Berkaitan dengan uji instrumen, maka peneliti menggunakan sampel percobaan sebanyak 30 data responden. Sementara uji instrumen yang dilakukan peneliti meliputi uji validitas dan uji reliabilitas.

1. Uji Validitas

Uji validitas merupakan pengujian yang berfungsi untuk mengetahui suatu data yang dapat dipercaya kebenarannya sesuai dengan kenyataan. Ketentuan uji validitas jika nilai r hitung $>$ nilai r tabel maka item butir kuesioner valid. Jika nilai r hitung $<$ nilai r tabel maka item butir kuesioner tidak valid. Nilai r tabel diperoleh melalui uji dua arah $\alpha = 0,05$ dan $df = n - 2$, dimana $n = 30$ sampel percobaan. Dalam tabel r yaitu tabel koefisien korelasi sederhana) $df = 30 - 2 = 28$ dan uji dua arah $\alpha = 0,05$ ditemukan nilai sebesar 0,361.

a. Uji Validitas Kuesioner Kepatuhan Wajib Pajak

Kuesioner kepatuhan wajib pajak memiliki enam butir pernyataan. Setiap butir kuesioner akan diuji tingkat validitasnya. Hal ini bermaksud agar setiap butir kuesioner dapat menghasilkan data yang benar-benar akurat. Adapun hasil uji validitas yang telah diolah peneliti berkaitan dengan tingkat validitas masing-masing butir kuesioner kepatuhan wajib pajak yaitu sebagai berikut:

Tabel 4.4
Uji Validitas Kuesioner Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan Wajib Pajak	r hitung	r tabel	Kesimpulan Status
Butir 1	0,551	0,361	Valid
Butir 2	0,673	0,361	Valid
Butir 3	0,803	0,361	Valid
Butir 4	0,563	0,361	Valid
Butir 5	0,630	0,361	Valid
Butir 6	0,821	0,361	Valid

Sumber : Hasil Uji Validitas Yang Diolah 2019

Keterangan data pada tabel diatas merupakan hasil output SPSS uji validitas yang telah diolah. Menurut tabel, tertera data yang menyatakan bahwa seluruh nilai r hitung lebih besar dari nilai r tabel. Oleh karena itu maka status seluruh item butir kuesioner kepatuhan wajib pajak dapat dinyatakan berstatus valid.

b. Uji Validitas Kuesioner *Self Assessment System*

Keakuratan data yang diperoleh dari penyebaran kuesioner *self assessment system* kepada wajib pajak juga harus diperhatikan. Oleh karena itu uji validitas dilakukan terhadap setiap butir kuesioner *self assessment system*. Hasil uji validitas masing-masing butir kuesioner *self assessment system* yaitu sebagai berikut:

Tabel 4.5
Uji Validitas Kuesioner *Self Assessment System*

Self Assessment System	r hitung	r tabel	Kesimpulan Status
Butir 1	0,799	0,361	Valid
Butir 2	0,841	0,361	Valid
Butir 3	0,857	0,361	Valid
Butir 4	0,779	0,361	Valid
Butir 5	0,812	0,361	Valid
Butir 6	0,788	0,361	Valid

Sumber : Hasil Uji Validitas Yang Diolah 2019

Data pada tabel diatas merupakan hasil output SPSS uji validitas yang telah diolah. Keterangan tabel tercantum nilai yang menyatakan bahwa seluruh nilai r hitung lebih besar dari nilai r tabel. Oleh karena itu maka status seluruh item butir kuesioner *self assessment system* dapat dinyatakan berstatus valid.

c. Uji Validitas Kuesioner Sosialisasi Pajak

Enam butir kuesioner sosialisasi pajak juga perlu diperhatikan tingkat validitasnya. Hal ini agar data pengisian kuesioner oleh wajib pajak juga akurat. Adapun hasil uji validitas yang telah diolah peneliti berkaitan tingkat validitas masing-masing butir kuesioner sosialisasi pajak yaitu sebagai berikut:

Tabel 4.6
Uji Validitas Kuesioner Sosialisasi Pajak

Sosialisasi Pajak	r hitung	r tabel	Kesimpulan Status
Butir 1	0,545	0,361	Valid
Butir 2	0,506	0,361	Valid
Butir 3	0,600	0,361	Valid
Butir 4	0,648	0,361	Valid
Butir 5	0,668	0,361	Valid
Butir 6	0,800	0,361	Valid

Sumber : Hasil Uji Validitas Yang Diolah 2019

Tabel tersebut diatas merupakan hasil output SPSS uji validitas terhadap kuesioner sosialisasi pajak yang telah diolah. Menurut tabel, tertera data yang menyatakan bahwa seluruh nilai r hitung lebih besar dari nilai r tabel. Dengan demikian maka status seluruh item butir kuesioner sosialisasi pajak dapat dinyatakan berstatus valid.

d. Uji Validitas Kuesioner Surat Tagihan Pajak

Sebagaimana kuesioner lainnya, enam butir kuesioner surat tagihan pajak juga perlu diperhatikan tingkat validitasnya. Hal ini agar data pengisian kuesioner oleh wajib pajak juga akurat. Hasil uji validitas yang telah diolah peneliti berkaitan tingkat validitas masing-masing butir kuesioner surat tagihan pajak yaitu sebagai berikut:

Tabel 4.7
Uji Validitas Kuesioner Surat Tagihan Pajak

Surat Tagihan Pajak	r hitung	r tabel	Kesimpulan Status
Butir 1	0,765	0,361	Valid
Butir 2	0,443	0,361	Valid
Butir 3	0,797	0,361	Valid
Butir 4	0,685	0,361	Valid
Butir 5	0,691	0,361	Valid
Butir 6	0,767	0,361	Valid

Sumber : Hasil Uji Validitas Yang Diolah 2019

Tabel tersebut diatas merupakan hasil output SPSS uji validitas terhadap kuesioner surat tagihan pajak yang telah diolah. Menurut tabel, tertera data yang menyatakan bahwa seluruh nilai r hitung lebih besar dari nilai pembandingan yaitu 0,3. Dengan demikian maka status seluruh item butir kuesioner surat tagihan pajak dinyatakan berstatus valid.

2. Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas pada penelitian ini dilakukan untuk mengetahui seberapa jauh hasil pengukuran tetap konsisten apabila dilakukan pengukuran dua kali atau lebih terhadap gejala yang sama dengan alat pengukur yang sama. Syarat minimum yang dianggap memenuhi syarat adalah apabila koefisien *alpha cronbach's* $> 0,6$. Jika koefisien yang didapat kurang dari 0,6 maka instrumen penelitian tersebut dinyatakan tidak reliabel. Hasil uji reliabilitas yang telah diolah peneliti terhadap seluruh kuesioner yang terdapat dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

Tabel 4.8
Uji Reliabilitas Kuesioner Penelitian

Kuesioner Penelitian	Nilai Alpha	Pembanding	Keterangan Status
Kepatuhan Wajib Pajak	0,770	0,6	Reliabel
<i>Self Assessment System</i>	0,801	0,6	Reliabel
Sosialisasi Pajak	0,750	0,6	Reliabel
Surat Tagihan Pajak	0,775	0,6	Reliabel

Sumber : Data Uji Reliabilitas Yang Diolah 2019

Keterangan data pada tabel diatas merupakan hasil output SPSS uji reliabilitas terhadap seluruh kuesioner penelitian. Berdasarkan uji reliabilitas yang telah dilakukan seperti tampak pada data tabel tersebut, menunjukan nilai alpha seluruh kuesioner memiliki nilai yang lebih besar dari 0,6. Oleh karena itu maka status seluruh kuesioner adalah reliabel.

D. Teknik Analisis Data

1. Uji Asumsi Klasik

a. Uji Normalitas

Uji normalitas yang dilakukan bertujuan untuk mengetahui apakah variabel dependen, independen atau keduanya berdistribusi normal, mendekati normal atau tidak. Model regresi yang baik hendaknya berdistribusi normal atau mendekati normal. Pengujian normalitas data menggunakan *Test Normality Kolmogorov-Smirnov* pada program SPSS. Hasil uji normalitas yaitu sebagai berikut:

Tabel 4.9
Uji Normalitas

		Unstandardized Residual
N		100
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	,00000
	Std. Deviation	1,939057
Most Extreme Differences	Absolute	,081
	Positive	,075
	Negative	-,081
Test Statistic		,081
Asymp. Sig. (2-tailed)		,103 ^c

Sumber: Data Output SPSS Uji Normalitas 2019

Menurut hasil data output seperti tampak pada tabel tersebut diatas terlihat nilai signifikansi (*Asymp. Sig. (2-tailed)*) yaitu sebesar 0,103. Nilai signifikansi tersebut lebih besar dari taraf signifikansi 0,05. Dengan demikian maka model regresi yang dihasilkan memiliki nilai residual yang berdistribusi secara normal.

b. Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Model yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel independen. Salah satu cara untuk dapat mendeteksi ada atau tidaknya multikolinearitas dalam model regresi adalah dapat dilihat dengan nilai *tolerance* dan nilai *inflation factor* (VIF). Apabila nilai *tolerance* $> 0,10$ atau sama dengan nilai $VIF < 10$ maka model regresi terbebas dari gejala multikolinearitas. Sementara jika nilai *tolerance* $< 0,10$ atau sama dengan nilai $VIF > 10,00$ maka model regresi terdapat gejala multikolinearitas. Hasil uji multikolinearitas yaitu sebagai berikut:

Tabel 4.10
Uji Multikolinearitas

Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	Self	,712	1,404
	Sosialisasi	,811	1,234
	Tagihan	,658	1,519

Sumber: Data Output SPSS Uji Multikolinearitas 2019

Menurut keterangan tabel diatas, jika diamati nilai *tolerance self assesment system*, sosialisasi pajak dan surat tagihan pajak berturut-turut yaitu sebesar 0,712 ; 0,811 dan 0,658 semua lebih besar dari 0,10. Sementara disisi lain menyebutkan nilai *VIF self assesment system*, sosialisasi pajak dan surat tagihan pajak berturut-turut yaitu sebesar 0,404 ; 0,234 dan 0,519 semua lebih kecil dari 10,00. Oleh karena itu maka model regresi yang dihasilkan terbebas dari multikolinearitas.

2. Analisis Linier Berganda

Analisis regresi linier berganda adalah hubungan secara linear antara dua atau lebih variabel independen dengan variabel dependen. Analisis ini untuk mengetahui arah hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen serta memprediksi nilai variabel dependen jika variabel independen naik atau turun. Dalam penelitian ini variabel independen yaitu *self assessment system*, sosialisasi pajak dan surat tagihan pajak, dan variabel dependen yaitu kepatuhan wajib pajak. Hasil analisis regresi berganda yaitu sebagai berikut:

Tabel 4.11
Analisis Regresi Berganda

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients
	B	Std. Error	Beta
1 (Constant)	5,731	1,594	
Self	,179	,058	,209
Sosialisasi	-,078	,073	-,067
Tagihan	,633	,061	,730

Sumber: Data Output SPSS Analisis Regresi Berganda 2019

Tabel tersebut diatas merupakan hasil data ouput SPSS analisis regresi berganda. Kolom B pada keterangan tabel menerangkan nilai-nilai yaitu nilai konstanta yaitu sebesar 5,731 ; nilai koefisien regresi dari variabel *self assessment system* yaitu sebesar 0,179 ; nilai koefisien regresi dari variabel sosialisasi pajak yaitu sebesar – 0,078 dan nilai koefisien regresi dari variabel surat tagihan pajak yaitu sebesar 0,633. Oleh karena itu maka persamaan regresi yang terbentuk yaitu sebagai berikut:

$$\text{KWP} = 5,731 + 0,179 \text{ SAS} - 0,078 \text{ SSP} + 0,633 \text{ STP}$$

Dimana:

KWP	=	Kepatuhan Wajib Pajak
SAS	=	<i>Self Assessment System</i>
SSP	=	Sosialisasi Pajak
STP	=	Surat Tagihan Pajak

Definisi Persamaan:

- a. Nilai konstanta sebesar 5,731 berarti jika nilai variabel *self assessment system*, sosialisasi pajak dan surat tagihan pajak tidak bernilai atau bernilai nol atau tidak dimasukkan kedalam model regresi, maka nilai kepatuhan wajib pajak adalah sebesar 5,731 satuan.
- b. Nilai koefisien regresi dari variabel *self assessment system* sebesar 0,179 menunjukkan jika nilai *self assessment system* naik sebesar satu satuan, maka nilai kepatuhan wajib pajak naik sebesar 0,179 satuan (asumsi nilai variabel sosialisasi pajak dan surat tagihan pajak adalah konstan).
- c. Nilai koefisien regresi dari variabel sosialisasi pajak sebesar – 0,078 menunjukkan jika nilai sosialisasi pajak naik sebesar satu satuan, maka nilai kepatuhan wajib pajak turun sebesar 0,078 satuan (asumsi nilai variabel *self assessment system* dan surat tagihan pajak adalah konstan).
- d. Nilai koefisien regresi dari variabel surat tagihan pajak sebesar 0,633 menunjukkan jika nilai surat tagihan pajak naik sebesar satu satuan, maka nilai kepatuhan wajib pajak naik sebesar 0,633 satuan (asumsi nilai variabel *self assessment system* dan sosialisasi pajak adalah konstan).

3. Uji Hipotesis (Uji t)

Uji ini digunakan untuk mengetahui apakah pengaruh masing-masing variabel *self assessment system*, sosialisasi pajak dan surat tagihan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak bermakna atau tidak pada model regresi. Dalam uji t ini memiliki kriteria pengujian jika probabilitas nilai t atau signifikansi $< 0,05$ maka berarti hipotesis diterima atau terdapat pengaruh yang signifikan, sebaliknya jika nilai signifikansi $> 0,05$ maka hipotesis ditolak atau tidak terdapat pengaruh yang signifikan. Hasil uji hipotesis (uji t) yaitu sebagai berikut:

Tabel 4.12
Uji Hipotesis (Uji t)

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	5,731	1,594		3,596	,001
Self	,179	,058	,209	3,101	,003
Sosialisasi	-,078	,073	-,067	-1,064	,290
Tagihan	,633	,061	,730	10,425	,000

Sumber: Data Output SPSS Uji Hipotesis (Uji t) 2019

Tabel tersebut diatas memberikan beberapa kesimpulan yaitu:

- a. Terdapat pengaruh *self assesment system* terhadap kepatuhan wajib pajak pada KPP Pratama Kota Tegal. Hal ini karena ditemukan nilai signifikansi pada variabel *self assesment system* sebesar $0,003 < 0,05$.
- b. Tidak terdapat pengaruh sosialisasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak pada KPP Pratama Kota Tegal. Hal ini karena ditemukan nilai signifikansi pada variabel sosialisasi pajak yaitu sebesar $0,290 > 0,05$.

- c. Terdapat adanya pengaruh surat tagihan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak pada KPP Pratama Kota Tegal. Hal ini karena ditemukan nilai signifikansi pada variabel surat tagihan pajak yaitu sebesar $0,000 < 0,05$.

4. Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi pada penelitian ini berfungsi untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel kepatuhan wajib pajak. Berkaitan dengan hal nilai koefisien determinasi peneliti menggunakan nilai Adjusted R^2 pada saat mengevaluasi mana model regresi terbaik dalam keterangan hasil output SPSS koefisien determinasi. Adapun hasil output SPSS nya adalah sebagai berikut:

Tabel 4.13
Koefisien Determinasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,831 ^a	,690	,681	1,969

Sumber: Data Output SPSS Koefisien Determinasi 2019

Nilai koefisien determinasi dalam tabel tersebut diatas dapat ditunjukan pada nilai *Adjusted R Square*. Nilai koefisien determinasi yang tertera sebesar 0,681. Hal ini berarti nilai sebesar 0,681 atau 68,1% merupakan besarnya kemampuan model regresi (*self assessment system*, sosialisasi pajak dan surat tagihan pajak) dalam menerangkan variasi variabel kepatuhan wajib pajak. Sementara nilai sisa sebesar 31,9% merupakan kemampuan variabel lain diluar model regresi yang tidak dapat diterangkan.

E. Pembahasan

1. Pengaruh *Self Assessment System* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hasil penelitian menyatakan yaitu terdapat pengaruh positif dan signifikan *self assesment system* terhadap kepatuhan wajib pajak pada KPP Pratama Kota Tegal. Hal ini karena ditemukan nilai koefisien regresi pada variabel *self assesment system* yaitu sebesar 0,179 nilai signifikansi yaitu sebesar $0,003 < 0,05$. Hal ini dikarenakan *self assesment system* dibuat untuk meningkatkan peran serta masyarakat didalam pemenuhan kewajiban perpajakan, apabila system ini dilaksanakan dengan baik maka dapat meningkatkan kepatuhan secara sukarela (Lasmaya dan Fitriani, 2017). Untuk mengurangi gagalnya system ini diperlukan adanya sanksi pajak yang dikenakan pada wajib pajak yang melanggar dalam pembayaran pajak, semakin tegas sanksi yang diberikan maka tingkat kepatuhan semakin besar sanksi (Nurlaela, 2018).

Kondisi ini sesuai dengan teori kepatuhan yaitu wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakannya secara formal dengan undang-undang yang berlaku dengan membayar pajak sesuai waktu yang ditentukan atau tepat waktu dan melaporkan kewajiban perpajakannya dengan benar.

Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Lasmaya dan Fitriani, (2017). Dan Nurlaela, (2018). Yang meyakini *self assesment system* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

2. Pengaruh Sosialisasi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Penelitian ini memberikan hasil kesimpulan yang menyebutkan bahwa tidak terdapat adanya pengaruh sosialisasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak pada KPP Pratama Kota Tegal. Hal ini karena ditemukan nilai koefisien regresi pada variabel sosialisasi pajak sebesar $-0,078$ dan nilai signifikansi sebesar $0,290 > 0,05$. Hal ini dikarenakan sosialisasi tentang perpajakan pada wajib pajak di KPP Pratama Tegal belum bisa merubah kesadaran masyarakat dalam kepatuhan membayar pajak. Lemahnya kesadaran tersebut menyebabkan wajib pajak terlambat ataupun tidak membayar hutang pajaknya. Tindakan sosialisasi pajak yang dilakukan oleh pihak penyelenggara pajak dapat berjalan secara efektif, manakala kepatuhan wajib pajak mengalami peningkatan. Oleh karena itu konsep sosialisasi yang perlu diterapkan harus berkaitan dengan bagaimana melatih wajib pajak bertindak secara mandiri wajib pajak bisa melakukan pencatatan sendiri, menghitung, melapor serta membayar sendiri (Winerungan, 2013).

Kondisi ini sesuai dengan teori kepatuhan dimana kesadaran masyarakat mempengaruhi pada kepatuhan, semakin tinggi kesadaran masyarakat maka semakin tinggi kepatuhan dalam membayar hutang perpajakannya.

Hasil penelitian mendukung penelitian yang dilakukan oleh Winerungan, (2013). Yang menunjukkan bahwa sosialisasi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

3. Pengaruh Surat Tagihan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Penelitian ini memberikan hasil yang menyebutkan bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan surat tagihan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak pada KPP Pratama Kota Tegal. Hal ini karena ditemukan nilai koefisien regresi pada variabel surat tagihan pajak sebesar 0,633 dan nilai signifikansi pada variabel surat tagihan pajak yaitu sebesar $0,000 < 0,05$. Hal ini dikarenakan surat tagihan pajak memiliki peranan penting untuk menegur wajib pajak agar tidak terlambat dalam melaksanakan kewajiban perpajakan mereka. Surat tagihan pajak dapat diberikan kepada wajib pajak yang terlambat dalam membayar pajak sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan dalam undang-undang. Pada dasarnya sistem penerapan surat tagihan pajak bertujuan untuk membentuk kedisiplinan wajib pajak, mengingatkan dan atau memberikan beberapa saran dan kritik yang dapat menggerakkan hati mereka.

Kondisi ini sesuai dengan teori kepatuhan dimana surat tagihan pajak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, semakin tinggi kesadaran wajib pajak maka semakin tinggi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak (Prasetyo, 2016).

Hasil penelitian ini mendukung penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Rachmawati, dkk (2015). Yang menunjukkan bahwa Surat tagihan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan secara lengkap dalam pembahasan tersebut, maka peneliti dapat memberikan beberapa kesimpulan yaitu sebagai berikut:

1. Adanya pengaruh yang positif dan signifikan *self assesment system* terhadap kepatuhan wajib pajak pada KPP Pratama Kota Tegal. Nilai positif memiliki suatu pengertian bahwa jika nilai *self assesment system* naik, maka nilai kepatuhan wajib pajak juga naik. Keadaan sebaliknya jika *self assesment system* turun, maka nilai kepatuhan wajib pajak juga turun.
2. Tidak adanya pengaruh sosialisasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak pada KPP Pratama Kota Tegal. Makna tidak terdapatnya pengaruh memberikan suatu kesimpulan bahwa setiap kenaikan atau penurunan variabel sosialisasi pajak, tidak akan menyebabkan kenaikan atau penurunan kepatuhan wajib pajak.
3. Adanya pengaruh yang positif dan signifikan surat tagihan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak pada KPP Pratama Kota Tegal. Nilai positif memiliki suatu pengertian bahwa jika nilai surat tagihan pajak naik, maka nilai kepatuhan wajib pajak juga naik. Keadaan sebaliknya jika surat tagihan pajak turun, maka nilai kepatuhan wajib pajak juga turun.

B. Saran

Berdasarkan beberapa kesimpulan yang telah dijelaskan tersebut diatas, maka peneliti dapat memberikan beberapa saran sebagai berikut :

1. Sistem *self assesment* terdapat pemberian kepercayaan kepada Wajib Pajak untuk melakukan sendiri kewajiban perpajakannya, mulai dari mendaftarkan diri, kemudian menghitung, menyetor dan melaporkan pajak terutang. Saran peneliti adalah hendaknya perlu pengawasan dan pemeriksaan dalam sistem *self assesment*. Dusahakan pihak fiskus tidak hanya memeriksa kepada wajib pajak yang terutang saja, namun lebih dari itu juga mengaasi dan memeriksa ulang wajib pajak yang telah membayar. Berkaitan dengan hal ini untuk dapat membantu pihak fiskus bekerja secara maksimal, perlu juga melengkapi dengan berbagai aplikasi komputerisasi secara otomatis yang memudahkan pengawasan dan pemeriksaan wajib pajak.
2. Sosialisasi pajak merupakan suatu upaya untuk memberikan pengertian, informasi, dan pembinaan pada masyarakat khususnya wajib pajak mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan perpajakan. Saran peneliti kepada KPP Pratama Tegal yaitu perlunya sosialisasi pajak melalui sosial media misalnya dengan menggunakan Facebook, Twitter, Instagram, Email dan Whatsapp. Media sosial, sebagai salah satu produk teknologi, kini telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan masyarakat. Sosialisasi melalui saluran sosial media dinilai sangat efektif untuk menyebarkan informasi yang berhubungan dengan sosialisasi, penyuluhan dan kehumasan. Selain jangkauannya yang luas, pesan yang disampaikan akan lebih cepat.

3. Surat Tagihan Pajak (STP) merupakan surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda dan berfungsi sebagai koreksi pajak terutang, sarana mengenakan sanksi kepada wajib pajak, serta sarana menagih pajak. Saran peneliti kepada KPP Pratama Tegal yaitu perlunya selalu melakukan pengawasan secara kontinue terhadap wajib pajak yang terlambat membayar pajak dan sesegera mungkin memberikan surat tagihan pajak agar tidak tidak berlarut-larut. Hal ini berfungsi untuk memberitahukan wajib pajak barangkali terjadi kelupaan dalam membayar pajak. Tidak hanya itu saja pihak penyelenggara pajak juga perlu berusaha memberikan pengarahan melalui sosialisasi pajak berupa media sosial perihal keterlambatan pajak dan akibatnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Adiatma, Adetya Erlian. Handayani, Siti Ragil dan Hidayat, Kadarisman. 2015. “Pengaruh Edukasi, Sosialisasi, Dan Himbauan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Melaporkan SPT Tahunan Pajak Penghasilan”. *Jurnal Perpajakan*. Volume 8. Nomor 1. Tahun 2015.
- Ananda, Pasca Rizki. Kumadji, Srihandi dan Husaini, Achmad. 2015. “Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Tarif Pajak, Dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak”. *Jurnal Perpajakan*. Volume 6. Nomor 2. Tahun 2015.
- Aritonang, Dewi Meta M dan Susilowati, Neni. 2014 “Pengaruh Sosialisasi Pajak Oleh Direktorat Jendral Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak Penghasilan”. *Jurnal Perpajakan*. Volume 4. Nomor 1. Tahun 2014.
- Direktorat Jenderal Pajak. 2012. *Strategi Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak*, diakses pada tanggal 11 Januari 2019 dari www.pajak.go.id.
- Direktorat Jenderal Pajak. 2016. *Data Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Pelaporan SPT*, diakses pada tanggal 13 Januari 2019 dari www.pajak.go.id.
- Faizin, Rizza. Kertahadi dan Ruhana, Ika. 2016. “Pengaruh Sosialisasi Pemahaman Dan Kesadaran Prosedur Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak”. *Jurnal Perpajakan*. Volume 9. Nomor 1. Tahun 2016.
- Ghozali, Imam. 2016. *Aplikasi Analisis Multivariete dengan Program SPSS 23*. Cetakan Kedelapan. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hartati, Neneng. 2015. *Pengantar Perpajakan*. Cetakan Pertama. Bandung: Pustaka Setia.
- Lasmaya, Mia S. dan Fitriani, Nur Neni. 2017. “Pengaruh Self Assesment System Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak”. *Jurnal Computech dan Bisnis*. Volume 11. Nomor 2. Tahun 2017.
- Mardiasmo. 2016. *Perpajakan Edisi Terbaru*. Edisi Revisi. Yogyakarta: Andi Yogyakarta.
- Nurlaela, Lina. 2018. “Pengaruh Self Assessment System Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak”. *Jurnal Wahana Akuntansi*. Volume 03. Nomor 01. Tahun 2018.

- Prastyo, Whedy. 2016. "Penerbitan Surat Tagihan Pajak Dan Tindakan Penagihan Dengan Tingkat Pelunasan Kewajiban Perpajakan". *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*. Volume 7. Nomor 3. Tahun 2016.
- Rachmawati, Rizka Laila. Saifi, Muhammad dan Mayowan, Yuniadi. 2015. "Pengaruh Surat Tagihan Pajak Daerah Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Restoran (Studi Pada Kota Batu Jawa Timur)". *Jurnal Administrasi Bisnis dan Pajak*. Volume 5. Nomor 2. Tahun 2015.
- Rahayu, S.K. 2013. *Perpajakan Indonesia-Konsep dan Aspek Formal*. Edisi Revisi. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Resmi, Siti. 2014. *Perpajakan Teori dan Kasus*. Edisi Kedelapan. Jakarta: Salemba Empat.
- Rustiyahningsih, S. 2011. "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak". *Jurnal Akuntansi* (2) : 44-45. Tahun 2011.
- Siyoto, Sandu dan Ali Sodik. 2015. *Dasar Metodologi Penelitian*. Cetakan Kesatu. Yogyakarta: Literasi Media Publisng.
- Siyoto, Sandu dan Ali Sodik. 2015. *Dasar Metodologi Penelitian*. Cetakan Kesatu. Yogyakarta: Literasi Media Publisng.
- Sudaryati, Dwi dan Hehanusa, Gerlan. 2015. "Pengaruh Penerapan Self Assessment System Dan Kemauan Membayar Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil Menengah Di Kabupaten Sleman Yogyakarta". *Jurnal Perpajakan*. Volume 6. Nomor 1. Tahun 2015.
- Sudirman, Rismawati dan Antong Amirudin. 2016. *Perpajakan Pendekatan dan Praktek*. Cetakan Kelima. Edisi Revisi. Malang: Empat Dua Media.
- Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Administrasi. Dilengkapi dengan Metode R&D*. Cetakan Keduapuluhtiga. Bandung : Alfabeta. Tabora Media.
- Umar, Husein. 2013. *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*. Edisi Kedua. Cetakan Keduabelas. Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Vegirawati, Titin. 2011. "Hubungan Antara Penerbitan Surat Tagihan Pajak Dengan Penerimaan Pajak Pada KPP Pratama Ilir Timur Pelembang". *Jurnal Ekonomi Dan Informasi Akuntansi (JENIUS)*. Volume 1. Nomor 3. Tahun 2011.

Wardani, Dewi Kusuma dan Wati, Erna. 2018. Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Pengetahuan Perpajakan Sebagai Variabel *Intervening* (Studi Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Di KPP Pratama Kebumen). *Jurnal Nominal*. Volume 7. Nomor 1. Tahun 2018.

Winerungan, Oktaviane Lidya. 2013. "Sosialisasi Perpajakan, Pelayanan Fiskus Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan WPOP Di KPP Manado Dan Kpp Bitung". *Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*. Volume 1. Nomor. 3. Tahun 2013.

Yolina. 2009. *Dasar-dasar Akuntansi Perpajakan*. Edisi Pertama. Yogyakarta:

Lampiran 1

KUESIONER PENELITIAN

Kami menjamin rahasia pribadi anda, semua data hanya semata-mata untuk kepentingan ilmiah

A. Identitas Responden

Nama :

Umur :

Jenis Kelamin :

Pendidikan :

Tegal,,2019

Tanda Tangan

.....

B. Pertanyaan

Pilihlah pertanyaan di bawah ini dengan memberi tanda (√) pada salah satu angka diantara nomor 1 s/d 5.

5 = Sangat Setuju (SS)

4 = Setuju (S)

3 = Netral (N)

2 = Tidak Setuju (TS)

1 = Sangat Tidak Setuju (STS)

Variabel Kepatuhan Wajib Pajak

No	Pertanyaan	STS 1	TD 2	N 3	S 4	SS 5
1.	Sebagai WP, saya melakukan pembukuan atau pencatatan dengan benar.					
2.	Saya tepat waktu dalam menyampaikan SPT tahunan setiap tahunnya.					
3.	Saya bersedia memenuhi kewajiban atas tunggakan pajak selama ini , jika ada .					
4.	Saya selalu menyetor dan melaporkan SPT masa dengan tepat waktu setiap bulannya.					
5.	Saya selalu menyetor dan melaporkan SPT dengan tepat dan sesuai.					
6.	Saya selalu menyetor dan melaporkan SPT dikantor					

Variabel *Self Assessment System*

No	Pertanyaan	STS 1	TD 2	N 3	S 4	SS 5
1.	Sebagai wajib pajak saya mendaftarkan diri ke KPP Pratama					
2.	Sebagai wajib pajak saya sudah mendapatkan NPWP					
3.	Sebagai wajib pajak saya melakukan perhitungan pajak sendiri					
4.	Saya selalu menghitung kredit pajak saya sendiri					
5.	Saya selalu menyetor dan melaporkan pajak terutang					
6.	Sebagai wajib pajak saya selalu melakukan pembayaran pajak sendiri					

Variabel Sosialisasi Pajak

No	Pertanyaan	STS 1	TD 2	N 3	S 4	SS 5
1.	Saya sering mengikuti Penyuluhan Pajak					
2.	Saya sering melihat Media-Media Sosialisasi melalui TV atau Talk Show lewat Radio.					
3.	Sebagai wajib pajak saya sering melakukan komunikasi dengan petugas terkait sosialisasi pajak					
4.	Sebagai wajib pajak saya juga sering melakukan komunikasi dengan sesama wajib pajak terkait sosialisasi pajak					
5.	Saya sering melihat petugas menyampaikan informasi pajak kepada wajib pajak					
6.	Sebagai wajib pajak setujukah diadakan spanduk sosialisasi tentang pajak					

Variabel Surat Tagihan Pajak

No	Pertanyaan	STS 1	TD 2	N 3	S 4	SS 5
1.	Sebagai wajib pajak saya pernah kurang bayar dalam pembayaran pajak.					
2.	Sebagai wajib pajak saya pernah melakukan salah hitung pajak.					
3.	Sebagai wajib pajak saya pernah tidak melapor pajak.					
4.	Sebagai wajib pajak saya pernah tidak mengisi faktur pajak.					
5.	Sebagai wajib pajak pernah membayar denda pajak.					
6.	Setujukah STP sebagai sarana mengenakan sanksi berupa bunga dan denda.					

Lampiran 2

Jawaban Uji Instrumen Kepatuhan Wajib Pajak

Resp	Kepatuhan Wajib Pajak						Skor
	Y.1	Y.2	Y.3	Y.4	Y.5	Y.6	
1	3	4	3	4	3	3	20
2	4	5	4	5	4	4	26
3	3	4	3	4	3	3	20
4	4	4	4	4	4	4	24
5	3	3	5	5	4	5	25
6	3	2	3	3	4	2	17
7	5	3	3	4	3	3	21
8	3	4	5	3	4	5	24
9	3	4	5	3	5	5	25
10	5	4	4	4	4	4	25
11	3	3	4	3	3	3	19
12	4	4	5	4	4	5	26
13	3	3	5	3	4	5	23
14	4	4	5	4	5	5	27
15	3	4	4	4	4	4	23
16	2	2	2	3	3	2	14
17	5	3	4	5	4	3	24
18	4	4	3	4	3	4	22
19	5	5	4	5	3	3	25
20	3	2	2	3	4	3	17
21	4	4	4	4	3	3	22
22	4	3	3	4	4	4	22
23	4	4	5	4	5	5	27
24	4	4	5	5	5	5	28
25	3	3	4	3	4	3	20
26	3	3	4	5	4	3	22
27	4	4	3	4	3	4	22
28	5	4	4	4	5	5	27
29	4	4	3	4	3	3	21
30	4	4	3	3	3	3	20

Lampiran 3

Jawaban Uji Instrumen *Self Assessment System*

Resp	<i>Self Assesment System</i>						Skor
	X1.1	X1.2	X1.3	X1.4	X1.5	X1.6	
1	5	4	4	5	5	4	27
2	4	3	3	4	4	3	21
3	3	3	3	3	3	3	18
4	4	4	4	4	4	4	24
5	4	4	4	4	3	3	22
6	4	5	5	5	5	4	28
7	5	4	5	5	4	4	27
8	5	4	5	4	4	4	26
9	5	5	5	5	5	4	29
10	4	4	3	4	3	3	21
11	5	5	5	5	4	4	28
12	2	2	3	4	3	3	17
13	3	3	2	4	3	2	17
14	5	4	5	5	4	4	27
15	3	5	5	5	3	4	25
16	3	3	3	3	4	3	19
17	3	2	4	3	2	3	17
18	4	3	3	3	2	3	18
19	4	2	4	4	3	3	20
20	4	4	3	3	4	5	23
21	5	4	5	5	5	4	28
22	4	4	4	4	3	3	22
23	3	3	4	4	3	4	21
24	5	5	4	4	4	4	26
25	4	5	5	4	4	5	27
26	3	3	3	3	2	3	17
27	3	4	3	3	4	3	20
28	4	5	5	4	5	5	28
29	4	4	4	4	4	4	24
30	3	3	3	3	3	3	18

Lampiran 4

Jawaban Uji Instrumen Sosialisasi Pajak

Resp	Sosialisasi Pajak						Skor
	X2.1	X2.2	X2.3	X2.4	X2.5	X2.6	
1	5	5	4	4	4	4	26
2	3	3	4	4	3	3	20
3	3	3	5	5	4	4	24
4	4	4	4	5	5	5	27
5	4	5	4	4	5	4	26
6	3	5	3	4	3	3	21
7	3	3	3	3	5	3	20
8	4	5	4	4	5	5	27
9	4	3	2	4	3	3	19
10	4	2	4	4	3	3	20
11	3	5	3	5	4	3	23
12	3	5	3	3	4	4	22
13	3	5	4	3	4	4	23
14	3	4	3	3	3	2	18
15	4	5	3	4	4	4	24
16	3	4	3	3	2	4	19
17	3	5	2	3	3	3	19
18	4	4	4	5	4	4	25
19	3	3	3	2	3	2	16
20	3	3	4	3	5	4	22
21	4	4	4	4	4	3	23
22	4	5	3	4	3	3	22
23	3	4	3	3	3	3	19
24	4	3	3	3	3	4	20
25	3	4	5	3	5	5	25
26	3	4	3	3	3	3	19
27	4	5	3	5	3	4	24
28	3	3	2	3	3	3	17
29	5	5	3	5	3	4	25
30	3	4	5	3	4	4	23

Lampiran 5

Jawaban Uji Instrumen Surat Tagihan Pajak

Resp	Surat Tagihan Pajak						Skor
	X3.1	X3.2	X3.3	X3.4	X3.5	X3.6	
1	3	3	3	3	3	3	18
2	3	4	3	4	3	4	21
3	5	5	4	5	4	5	28
4	4	4	5	4	4	5	26
5	4	4	5	5	5	5	28
6	3	5	4	3	5	3	23
7	4	3	5	3	3	4	22
8	5	3	5	5	5	3	26
9	5	3	5	4	5	5	27
10	5	4	5	4	4	5	27
11	3	3	5	3	3	5	22
12	4	4	5	4	5	5	27
13	4	4	5	5	4	4	26
14	5	4	5	5	5	5	29
15	4	4	5	3	5	5	26
16	3	3	2	2	4	3	17
17	3	4	3	2	2	2	16
18	5	3	5	5	3	5	26
19	4	4	5	4	5	4	26
20	3	3	4	4	3	4	21
21	3	3	2	5	4	3	20
22	3	4	5	4	4	4	24
23	5	4	5	5	5	5	29
24	5	5	5	5	5	5	30
25	3	3	3	4	3	4	20
26	3	5	5	3	5	4	25
27	3	3	5	5	5	5	26
28	5	4	5	5	4	5	28
29	3	3	5	5	5	3	24
30	4	3	4	4	4	4	23

Lampiran 6

Jawaban Kuesioner Kepatuhan Wajib Pajak

Resp	Kepatuhan Wajib Pajak						Skor
	Y.1	Y.2	Y.3	Y.4	Y.5	Y.6	
1	3	5	5	3	5	5	26
2	3	3	4	3	3	3	19
3	4	4	4	4	4	4	24
4	4	3	3	4	3	4	21
5	5	4	3	3	3	3	21
6	4	4	4	5	4	4	25
7	4	5	3	5	3	3	23
8	3	3	4	3	3	4	20
9	5	3	3	2	2	2	17
10	5	2	2	3	4	5	21
11	4	4	4	5	2	4	23
12	4	3	5	2	3	4	21
13	4	4	4	4	4	4	24
14	3	3	2	3	2	3	16
15	4	4	4	3	2	4	21
16	4	4	3	5	2	4	22
17	3	3	4	3	3	3	19
18	3	4	4	5	5	5	26
19	4	4	4	4	4	4	24
20	3	3	4	3	3	3	19
21	3	2	3	3	3	4	18
22	5	4	4	5	4	4	26
23	3	3	2	4	3	5	20
24	5	5	4	4	3	5	26
25	3	2	4	3	2	4	18
26	5	4	3	5	3	3	23
27	4	3	3	4	2	3	19
28	2	4	5	3	2	5	21
29	4	4	3	4	4	4	23
30	3	3	3	4	2	2	17
31	4	3	5	4	4	4	24
32	4	4	4	4	3	3	22
33	3	3	4	4	2	3	19
34	4	4	4	4	4	4	24
35	3	3	3	3	3	3	18
36	3	3	2	3	2	3	16
37	4	4	4	4	3	4	23
38	2	5	4	3	3	4	21
39	5	4	4	5	4	5	27
40	5	3	4	3	4	5	24

Resp	Kepatuhan Wajib Pajak						Skor
	Y.1	Y.2	Y.3	Y.4	Y.5	Y.6	
41	2	4	3	2	4	4	19
42	5	3	5	4	3	4	24
43	5	4	4	5	3	5	26
44	3	3	2	3	2	3	16
45	4	3	2	4	4	4	21
46	4	4	4	3	3	4	22
47	5	2	2	3	4	5	21
48	3	3	4	2	4	2	18
49	4	5	5	4	5	4	27
50	2	4	3	3	4	2	18
51	5	5	4	5	3	3	25
52	2	2	3	3	2	4	16
53	5	3	3	3	3	5	22
54	2	3	4	4	3	4	20
55	2	4	3	4	4	3	20
56	4	4	2	4	4	4	22
57	4	2	3	4	4	4	21
58	4	2	2	2	2	4	16
59	3	2	5	5	4	4	23
60	4	4	4	5	4	4	25
61	5	5	4	5	5	4	28
62	3	3	3	2	2	3	16
63	3	4	4	3	3	3	20
64	4	4	4	5	4	4	25
65	5	4	4	5	4	5	27
66	3	3	3	2	3	3	17
67	4	4	4	4	4	3	23
68	5	5	5	3	4	5	27
69	3	3	4	4	3	3	20
70	4	5	4	4	4	4	25
71	2	3	3	4	3	3	18
72	5	4	4	5	4	3	25
73	5	3	3	4	4	4	23
74	3	3	4	5	5	5	25
75	5	4	4	4	4	5	26
76	4	4	4	3	4	4	23
77	5	5	4	4	3	5	26
78	4	5	3	2	4	4	22
79	5	5	4	4	4	5	27
80	4	3	2	4	2	5	20

Resp	Kepatuhan Wajib Pajak						Skor
	Y.1	Y.2	Y.3	Y.4	Y.5	Y.6	
81	4	4	5	5	4	4	26
82	3	4	3	2	3	2	17
83	5	4	5	4	4	4	26
84	3	2	3	2	4	4	18
85	2	3	4	3	3	2	17
86	4	3	3	4	3	2	19
87	5	3	3	4	5	5	25
88	5	4	4	5	4	3	25
89	4	3	3	3	3	4	20
90	3	3	5	4	5	3	23
91	4	3	3	3	3	4	20
92	2	3	3	5	4	2	19
93	4	4	4	3	4	4	23
94	4	5	4	2	3	2	20
95	4	4	4	3	4	4	23
96	2	2	4	4	4	3	19
97	3	4	2	2	2	2	15
98	2	3	3	4	3	3	18
99	3	3	4	5	3	3	21
100	5	4	5	5	5	5	29

Lampiran 7

Jawaban Kuesioner *Self Assessment System*

Resp	<i>Self Assesment System</i>						Skor
	X1.1	X1.2	X1.3	X1.4	X1.5	X1.6	
1	4	5	5	4	5	5	28
2	3	2	3	3	3	3	17
3	3	4	4	3	4	3	21
4	3	4	3	2	3	3	18
5	3	2	3	3	3	3	17
6	3	4	4	3	4	4	22
7	4	2	4	4	3	4	21
8	2	3	3	2	3	3	16
9	3	3	3	2	3	3	17
10	3	4	3	3	3	3	19
11	4	3	4	4	3	4	22
12	3	4	3	3	3	3	19
13	3	4	4	3	4	3	21
14	3	2	3	3	3	3	17
15	3	4	3	3	3	3	19
16	3	4	3	3	3	4	20
17	3	2	3	3	3	3	17
18	4	4	4	4	4	4	24
19	3	4	4	3	4	3	21
20	3	2	3	3	3	3	17
21	3	4	4	3	4	3	21
22	4	4	4	3	4	4	23
23	4	3	3	3	3	3	19
24	4	4	4	4	4	4	24
25	2	3	3	2	3	3	16
26	4	3	3	4	3	4	21
27	3	2	3	3	3	3	17
28	3	4	3	3	3	3	19
29	2	3	3	2	3	3	16
30	5	4	4	5	4	4	26
31	3	4	4	3	4	3	21
32	3	4	3	3	3	3	19
33	3	3	3	3	3	3	18
34	4	3	3	5	3	4	22
35	5	2	4	5	2	5	23
36	3	4	4	3	4	3	21
37	3	4	3	2	3	5	20
38	3	3	3	3	3	3	18
39	4	4	4	4	4	4	24
40	4	3	4	4	4	4	23

Resp	<i>Self Assesment System</i>						Skor
	X1.1	X1.2	X1.3	X1.4	X1.5	X1.6	
41	3	2	3	3	3	3	17
42	4	4	3	4	4	3	22
43	4	4	4	4	4	4	24
44	3	4	3	3	3	3	19
45	3	2	3	3	3	3	17
46	4	2	4	4	3	4	21
47	3	4	2	4	4	2	19
48	4	5	4	4	4	4	25
49	4	4	4	5	4	4	25
50	3	2	3	3	3	3	17
51	4	3	4	4	4	4	23
52	3	2	3	3	3	3	17
53	2	4	4	2	4	3	19
54	3	2	3	3	3	3	17
55	4	2	3	4	2	3	18
56	4	3	3	4	3	3	20
57	3	3	3	4	3	3	19
58	2	5	2	2	5	2	18
59	3	4	3	3	4	3	20
60	4	4	4	3	4	4	23
61	4	5	5	2	5	4	25
62	3	4	3	3	3	3	19
63	3	3	3	2	3	3	17
64	4	3	4	4	4	4	23
65	4	4	4	5	4	4	25
66	4	3	4	4	3	4	22
67	4	3	3	4	3	3	20
68	4	5	4	4	4	4	25
69	3	3	3	2	3	3	17
70	3	4	4	4	4	3	22
71	2	3	3	2	3	3	16
72	4	4	4	3	4	4	23
73	4	3	4	4	3	4	22
74	3	4	4	3	4	4	22
75	4	3	4	4	4	4	23
76	4	3	3	4	3	4	21
77	4	4	4	4	4	4	24
78	4	3	3	4	3	3	20
79	4	5	4	4	4	4	25
80	3	3	3	3	3	3	18

Resp	<i>Self Assesment System</i>						Skor
	X1.1	X1.2	X1.3	X1.4	X1.5	X1.6	
81	4	4	4	4	4	4	24
82	3	4	4	3	4	3	21
83	4	3	4	4	4	4	23
84	3	5	5	4	5	3	25
85	4	5	5	4	5	5	28
86	2	3	3	2	3	3	16
87	4	4	4	3	4	4	23
88	4	3	4	4	4	4	23
89	4	3	4	4	3	4	22
90	4	3	3	4	3	3	20
91	3	3	3	3	3	3	18
92	3	3	2	3	2	2	15
93	3	3	4	3	4	3	20
94	3	3	3	2	3	3	17
95	4	2	4	4	3	4	21
96	3	3	3	2	3	3	17
97	4	4	4	4	4	4	24
98	3	2	3	3	3	3	17
99	3	3	3	3	3	3	18
100	4	4	3	4	3	5	23

Lampiran 8

Jawaban Kuesioner Sosialisasi Pajak

Resp	Sosialisasi Pajak						Skor
	X2.1	X2.2	X2.3	X2.4	X2.5	X2.6	
1	3	4	3	4	5	5	24
2	4	3	2	4	3	4	20
3	5	4	4	4	4	5	26
4	4	4	3	4	4	4	23
5	4	3	3	4	3	4	21
6	5	4	4	5	4	5	27
7	4	4	5	4	4	4	25
8	4	4	2	4	3	4	21
9	3	3	3	3	3	3	18
10	4	4	4	4	4	4	24
11	5	4	4	4	4	4	25
12	4	4	4	4	4	3	23
13	5	4	4	4	4	5	26
14	3	2	3	3	2	3	16
15	3	4	4	4	4	4	23
16	4	4	4	4	4	4	24
17	2	3	3	3	3	2	16
18	4	5	5	5	5	4	28
19	5	5	3	5	5	4	27
20	3	4	4	3	4	3	21
21	3	3	4	3	3	3	19
22	5	4	5	5	5	5	29
23	3	4	5	3	5	3	23
24	5	5	4	5	4	5	28
25	4	3	2	4	3	4	20
26	5	4	4	4	4	4	25
27	2	3	3	5	3	5	21
28	4	4	3	4	4	4	23
29	4	4	5	4	4	4	25
30	3	3	2	3	3	3	17
31	5	4	4	4	4	5	26
32	3	4	4	4	4	4	23
33	4	3	3	4	3	4	21
34	5	4	2	5	4	5	25
35	4	3	2	4	2	4	19
36	3	3	3	2	3	2	16
37	4	4	4	4	4	4	24
38	4	5	2	5	4	5	25
39	5	5	4	5	4	5	28
40	5	4	4	5	4	5	27

Resp	Sosialisasi Pajak						Skor
	X2.1	X2.2	X2.3	X2.4	X2.5	X2.6	
41	2	3	3	3	3	2	16
42	4	5	5	4	5	4	27
43	4	5	5	5	5	4	28
44	2	4	4	4	4	3	21
45	3	4	4	3	4	3	21
46	3	4	4	5	4	4	24
47	4	4	4	4	4	4	24
48	4	3	3	3	3	3	19
49	5	5	5	5	4	5	29
50	4	4	2	4	2	4	20
51	5	4	4	5	4	5	27
52	3	3	3	3	3	3	18
53	4	4	4	4	4	4	24
54	3	3	3	5	3	5	22
55	3	4	4	3	4	3	21
56	4	4	4	4	4	4	24
57	4	4	3	4	4	4	23
58	3	3	4	3	3	3	19
59	4	4	5	4	4	4	25
60	5	4	4	5	4	5	27
61	2	4	4	2	4	2	18
62	2	2	4	3	4	3	18
63	3	3	2	3	2	3	16
64	5	4	4	5	4	5	27
65	5	5	4	5	5	5	29
66	4	3	3	3	3	3	19
67	4	4	4	4	4	4	24
68	5	5	4	5	5	5	29
69	4	4	2	4	3	4	21
70	4	5	5	4	5	4	27
71	2	3	5	3	3	3	19
72	5	5	5	3	5	4	27
73	5	4	4	4	4	5	26
74	5	4	4	5	4	5	27
75	4	5	5	4	5	4	27
76	4	4	5	4	4	4	25
77	5	5	4	5	4	5	28
78	4	4	4	4	4	4	24
79	5	5	4	5	5	5	29
80	3	3	2	3	2	3	16

Resp	Sosialisasi Pajak						Skor
	X2.1	X2.2	X2.3	X2.4	X2.5	X2.6	
81	5	5	4	5	4	5	28
82	2	3	3	3	3	3	17
83	5	4	4	5	4	5	27
84	3	2	2	3	3	3	16
85	4	3	3	3	3	3	19
86	2	4	4	3	4	3	20
87	4	5	4	5	4	5	27
88	2	5	5	5	5	4	26
89	4	3	3	3	3	4	20
90	4	4	4	4	4	4	24
91	3	4	4	4	4	4	23
92	3	3	2	3	3	3	17
93	4	4	5	4	4	4	25
94	3	5	4	3	4	3	22
95	4	2	2	4	2	4	18
96	3	4	5	3	4	3	22
97	3	3	2	3	2	3	16
98	4	3	3	3	3	4	20
99	2	3	3	3	3	2	16
100	4	4	2	4	4	4	22

Lampiran 9

Jawaban Kuesioner Surat Tagihan Pajak

Resp	Surat Tagihan Pajak						Skor
	X3.1	X3.2	X3.3	X3.4	X3.5	X3.6	
1	3	4	5	3	4	4	23
2	2	5	2	3	2	2	16
3	4	4	2	4	4	4	22
4	2	2	5	3	4	4	20
5	3	4	3	2	3	3	18
6	4	5	4	2	4	4	23
7	5	3	2	2	4	5	21
8	3	3	4	3	3	3	19
9	3	3	2	2	2	2	14
10	2	3	3	3	4	5	20
11	3	5	3	4	3	3	21
12	3	3	3	4	4	4	21
13	5	4	5	2	5	3	24
14	3	2	3	2	3	3	16
15	3	3	2	3	3	5	19
16	3	3	3	5	3	3	20
17	3	4	3	4	2	2	18
18	5	4	5	4	5	5	28
19	4	4	3	4	4	4	23
20	3	4	3	2	3	3	18
21	4	4	5	4	2	2	21
22	2	4	5	3	5	5	24
23	4	4	2	4	3	3	20
24	3	5	3	5	4	5	25
25	3	4	2	3	2	2	16
26	4	4	4	3	3	3	21
27	4	4	2	3	2	2	17
28	3	3	4	3	4	4	21
29	4	2	4	3	4	4	21
30	2	4	2	4	2	2	16
31	5	4	3	2	4	5	23
32	2	4	4	2	4	4	20
33	3	4	2	5	2	2	18
34	5	3	3	5	3	3	22
35	3	4	3	2	3	3	18
36	3	3	3	2	3	3	17
37	3	4	5	3	2	3	20
38	3	3	3	3	3	4	19
39	5	5	3	5	3	4	25
40	2	4	5	5	5	4	25

Resp	Surat Tagihan Pajak						Skor
	X3.1	X3.2	X3.3	X3.4	X3.5	X3.6	
41	3	4	3	2	3	3	18
42	5	4	5	3	4	4	25
43	5	3	4	5	4	4	25
44	2	4	2	5	2	2	17
45	2	4	3	2	3	3	17
46	4	3	4	3	4	4	22
47	4	2	5	3	5	4	23
48	2	4	2	3	2	2	15
49	5	4	4	5	4	4	26
50	4	3	2	2	3	3	17
51	5	5	4	4	3	3	24
52	3	2	3	3	3	3	17
53	4	2	5	2	3	5	21
54	4	2	3	3	3	3	18
55	2	3	3	4	3	3	18
56	3	5	5	3	2	2	20
57	3	3	2	5	3	4	20
58	3	2	3	3	3	3	17
59	5	4	3	5	3	3	23
60	3	5	4	5	4	4	25
61	4	5	5	5	4	5	28
62	2	2	4	2	4	3	17
63	2	4	2	4	2	2	16
64	4	4	4	4	4	4	24
65	4	5	4	4	4	5	26
66	3	3	2	3	2	3	16
67	2	5	4	4	4	3	22
68	4	4	5	4	5	5	27
69	3	4	3	3	3	3	19
70	4	3	4	4	4	4	23
71	4	4	2	5	2	2	19
72	5	4	4	3	5	5	26
73	5	5	2	4	3	3	22
74	4	4	4	4	4	4	24
75	4	5	5	4	4	4	26
76	4	3	4	4	4	4	23
77	5	4	4	3	4	5	25
78	3	2	5	4	3	4	21
79	5	2	5	5	5	5	27
80	4	4	3	3	2	2	18

Resp	Surat Tagihan Pajak						Skor
	X3.1	X3.2	X3.3	X3.4	X3.5	X3.6	
81	4	4	5	4	5	4	26
82	4	2	3	2	3	3	17
83	4	3	4	5	4	4	24
84	3	3	3	3	3	3	18
85	3	3	2	3	2	3	16
86	2	4	3	4	3	3	19
87	5	4	5	3	5	4	26
88	4	4	4	4	4	4	24
89	3	3	3	4	2	3	18
90	3	5	3	4	3	3	21
91	3	4	2	3	3	3	18
92	2	3	2	2	2	2	13
93	4	4	4	4	4	4	24
94	2	5	3	3	2	2	17
95	3	5	3	4	3	3	21
96	3	3	4	3	3	3	19
97	3	3	2	2	2	3	15
98	2	4	3	4	2	2	17
99	3	4	3	4	2	3	19
100	5	4	5	2	5	5	26

Lampiran 10

Uji Validitas Kepatuhan Wajib Pajak

Correlations								
		KWP1	KWP2	KWP3	KWP4	KWP5	KWP6	Skor
KWP1	Pearson Correlation	1	,473**	,119	,494**	,073	,174	,551**
	Sig. (2-tailed)		,008	,532	,006	,702	,357	,002
	N	30	30	30	30	30	30	30
KWP2	Pearson Correlation	,473**	1	,392*	,428*	,038	,424*	,673**
	Sig. (2-tailed)	,008		,032	,018	,844	,020	,000
	N	30	30	30	30	30	30	30
KWP3	Pearson Correlation	,119	,392*	1	,239	,635**	,771**	,803**
	Sig. (2-tailed)	,532	,032		,204	,000	,000	,000
	N	30	30	30	30	30	30	30
KWP4	Pearson Correlation	,494**	,428*	,239	1	,095	,165	,563**
	Sig. (2-tailed)	,006	,018	,204		,618	,385	,001
	N	30	30	30	30	30	30	30
KWP5	Pearson Correlation	,073	,038	,635**	,095	1	,676**	,630**
	Sig. (2-tailed)	,702	,844	,000	,618		,000	,000
	N	30	30	30	30	30	30	30
KWP6	Pearson Correlation	,174	,424*	,771**	,165	,676**	1	,821**
	Sig. (2-tailed)	,357	,020	,000	,385	,000		,000
	N	30	30	30	30	30	30	30
Skor	Pearson Correlation	,551**	,673**	,803**	,563**	,630**	,821**	1
	Sig. (2-tailed)	,002	,000	,000	,001	,000	,000	
	N	30	30	30	30	30	30	30

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

Lampiran 11

Uji Validitas Self Assessment System

		Correlations						
		SAS1	SAS2	SAS3	SAS4	SAS5	SAS6	Skor
SAS1	Pearson Correlation	1	,580**	,621**	,604**	,592**	,496**	,799**
	Sig. (2-tailed)		,001	,000	,000	,001	,005	,000
	N	30	30	30	30	30	30	30
SAS2	Pearson Correlation	,580**	1	,631**	,546**	,639**	,672**	,841**
	Sig. (2-tailed)	,001		,000	,002	,000	,000	,000
	N	30	30	30	30	30	30	30
SAS3	Pearson Correlation	,621**	,631**	1	,716**	,524**	,693**	,857**
	Sig. (2-tailed)	,000	,000		,000	,003	,000	,000
	N	30	30	30	30	30	30	30
SAS4	Pearson Correlation	,604**	,546**	,716**	1	,574**	,385*	,779**
	Sig. (2-tailed)	,000	,002	,000		,001	,036	,000
	N	30	30	30	30	30	30	30
SAS5	Pearson Correlation	,592**	,639**	,524**	,574**	1	,621**	,812**
	Sig. (2-tailed)	,001	,000	,003	,001		,000	,000
	N	30	30	30	30	30	30	30
SAS6	Pearson Correlation	,496**	,672**	,693**	,385*	,621**	1	,788**
	Sig. (2-tailed)	,005	,000	,000	,036	,000		,000
	N	30	30	30	30	30	30	30
Skor	Pearson Correlation	,799**	,841**	,857**	,779**	,812**	,788**	1
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,000	,000	,000	
	N	30	30	30	30	30	30	30

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

Lampiran 12

Uji Validitas Sosialisasi Pajak

		Correlations						
		SSP1	SSP2	SSP3	SSP4	SSP5	SSP6	Skor
SSP1	Pearson Correlation	1	,241	,034	,556**	,065	,318	,545**
	Sig. (2-tailed)		,199	,860	,001	,733	,086	,002
	N	30	30	30	30	30	30	30
SSP2	Pearson Correlation	,241	1	-,087	,254	,120	,288	,506**
	Sig. (2-tailed)	,199		,648	,175	,527	,123	,004
	N	30	30	30	30	30	30	30
SSP3	Pearson Correlation	,034	-,087	1	,197	,566**	,525**	,600**
	Sig. (2-tailed)	,860	,648		,298	,001	,003	,000
	N	30	30	30	30	30	30	30
SSP4	Pearson Correlation	,556**	,254	,197	1	,146	,325	,648**
	Sig. (2-tailed)	,001	,175	,298		,440	,080	,000
	N	30	30	30	30	30	30	30
SSP5	Pearson Correlation	,065	,120	,566**	,146	1	,563**	,668**
	Sig. (2-tailed)	,733	,527	,001	,440		,001	,000
	N	30	30	30	30	30	30	30
SSP6	Pearson Correlation	,318	,288	,525**	,325	,563**	1	,800**
	Sig. (2-tailed)	,086	,123	,003	,080	,001		,000
	N	30	30	30	30	30	30	30
Skor	Pearson Correlation	,545**	,506**	,600**	,648**	,668**	,800**	1
	Sig. (2-tailed)	,002	,004	,000	,000	,000	,000	
	N	30	30	30	30	30	30	30

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Lampiran 13

Uji Validitas Surat Tagihan Pajak

		Correlations						
		STP1	STP2	STP3	STP4	STP5	STP6	Skor
STP1	Pearson Correlation	1	,217	,521**	,521**	,336	,579**	,765**
	Sig. (2-tailed)		,250	,003	,003	,070	,001	,000
	N	30	30	30	30	30	30	30
STP2	Pearson Correlation	,217	1	,233	,031	,338	,210	,443*
	Sig. (2-tailed)	,250		,215	,870	,067	,264	,014
	N	30	30	30	30	30	30	30
STP3	Pearson Correlation	,521**	,233	1	,385*	,491**	,626**	,797**
	Sig. (2-tailed)	,003	,215		,036	,006	,000	,000
	N	30	30	30	30	30	30	30
STP4	Pearson Correlation	,521**	,031	,385*	1	,395*	,436*	,685**
	Sig. (2-tailed)	,003	,870	,036		,031	,016	,000
	N	30	30	30	30	30	30	30
STP5	Pearson Correlation	,336	,338	,491**	,395*	1	,311	,691**
	Sig. (2-tailed)	,070	,067	,006	,031		,094	,000
	N	30	30	30	30	30	30	30
STP6	Pearson Correlation	,579**	,210	,626**	,436*	,311	1	,767**
	Sig. (2-tailed)	,001	,264	,000	,016	,094		,000
	N	30	30	30	30	30	30	30
Skor	Pearson Correlation	,765**	,443*	,797**	,685**	,691**	,767**	1
	Sig. (2-tailed)	,000	,014	,000	,000	,000	,000	
	N	30	30	30	30	30	30	30

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

Lampiran 14

Uji Reliabilitas Kuesioner Penelitian

Kuesioner Kepatuhan Wajib Pajak

Reliability Statistics	
Cronbach's Alpha	N of Items
,770	7

Kuesioner *Self Assessment System*

Reliability Statistics	
Cronbach's Alpha	N of Items
,801	7

Kuesioner Sosialisasi Pajak

Reliability Statistics	
Cronbach's Alpha	N of Items
,750	7

Kuesioner Surat Tagihan Pajak

Reliability Statistics	
Cronbach's Alpha	N of Items
,775	7